

No	Indikator Kinerja/Komponen	Satuan	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
	PNBP BPSDM BLU	Miliar Rp	190,01	222,25	236,58	245,06	253,84
	PNBP Lainnya	Miliar Rp	1.011,97	1.097,64	1.111,61	1.162,14	1.161,91
	- Setjen	Miliar Rp	8,75	8,87	8,79	8,77	8,77
	- Itjen	Miliar Rp	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
	- DJK	Miliar Rp	0,52	0,07	0,07	0,57	0,31
	- Badan Geologi	Miliar Rp	2,64	2,64	2,70	2,74	2,77
	- BPH Migas	Miliar Rp	1.000	1.086	1.100	1.150	1.150
2	Persentase Realisasi Investasi	%	86	88	87	87	87
	Prognosis realisasi	Miliar USD	31,48	32,55	34,75	33,50	34
	Target Investasi	Miliar USD	36,54	37,12	40,05	38,64	39,04
	Investasi Migas	Miliar USD	14,54	18,60	22,59	25,16	25,24
	Investasi Minerba	Miliar USD	7,74	5,69	4,35	3,22	3,17
	Investasi Ketenagalistrikan	Miliar USD	11,95	9,91	7,55	6,64	3,10
	Investasi EBTKE	Miliar USD	2,31	2,92	5,56	3,62	7,53

Sasaran Strategis 6: Layanan Sektor ESDM yang Optimal

Dalam rangka mengukur layanan sektor ESDM yang optimal, maka ditetapkan indikator kinerja yang dapat dijadikan instrumen penilaian yaitu Indeks Kepuasan Layanan Sektor ESDM. Sejalan dengan gerakan reformasi birokrasi guna membangun kepercayaan publik yang lebih baik, KESDM telah berupaya meningkatkan kualitas layanan melalui beberapa terobosan inovatif berupa penetapan standar-standar pelayanan yang optimal. Guna mengukur sejauh mana kualitas pelayanan yang telah diberikan KESDM kepada masyarakat dan *stakeholders* terkait, yang saat ini berjumlah 113 layanan baik internal maupun eksternal, perlu dilakukan pengukuran tingkat kepuasan pengguna layanan terkait indikator-indikator spesifik berikut sesuai Permen PAN RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Layanan Publik yang ditetapkan berdasarkan aspek kepentingan dari setiap layanan dan kepuasan dari pelayanan yang diberikan. Indikator tersebut yaitu:

1. Persyaratan layanan/Standar Operasional Prosedur (SOP)

Aspek persyaratan layanan/SOP didefinisikan sebagai persepsi pengguna layanan mengenai kepentingan terhadap kebutuhan persyaratan layanan/SOP dalam sebuah layanan serta penilaian kepuasan terhadap kesesuaian pelayanan dengan persyaratan layanan/SOP yang telah ditetapkan sebelumnya.

2. Kemudahan prosedur layanan
Aspek kemudahan prosedur layanan didefinisikan sebagai persepsi pengguna layanan mengenai kepentingan terhadap kebutuhan prosedur pelayanan yang mudah dalam sebuah layanan serta penilaian kepuasan terhadap kemudahan prosedur layanan yang diberikan.
3. Kecepatan waktu layanan
Aspek kecepatan waktu layanan didefinisikan sebagai persepsi pengguna layanan mengenai kepentingan terhadap kebutuhan waktu layanan yang cepat dalam sebuah layanan serta penilaian kepuasan terhadap kecepatan waktu pelayanan yang diberikan.
4. Kewajaran terhadap biaya/tarif yang dibebankan
Aspek kewajaran terhadap biaya/tarif yang dibebankan didefinisikan sebagai persepsi pengguna layanan mengenai kepentingan terhadap kebutuhan tarif yang wajar dalam sebuah layanan serta penilaian kepuasan terhadap kewajaran tarif yang dibebankan terhadap pengguna layanan dengan jenis layanan yang diberikan.
5. Kesesuaian produk pelayanan pada standar pelayanan dengan hasil produk pelayanan
Aspek kesesuaian produk pelayanan pada standar pelayanan dengan hasil produk pelayanan didefinisikan sebagai persepsi pengguna layanan mengenai kepentingan terhadap kebutuhan pencantuman produk layanan yang dikeluarkan dalam standar layanan serta penilaian kepuasan terhadap hasil produk pelayanan jika dibandingkan dengan produk pelayanan yang dijanjikan dalam standar pelayanan.
6. Kompetensi dan kemampuan petugas (layanan tatap muka) atau ketersediaan informasi sistem *online* (layanan *online*)
 - a. Kompetensi dan kemampuan petugas (layanan tatap muka)
Aspek kompetensi dan kemampuan petugas didefinisikan sebagai persepsi pengguna layanan mengenai kepentingan terhadap perlu tidaknya kompetensi dan kemampuan petugas pada sebuah layanan serta penilaian kepuasan terhadap kompetensi dan kemampuan petugas yang diberikan.
 - b. Ketersediaan informasi sistem *online* (layanan *online*)
Aspek Ketersediaan informasi sistem *online* didefinisikan sebagai persepsi pengguna layanan mengenai kepentingan terhadap ketersediaan informasi pada sebuah layanan serta

penilaian kepuasan terhadap tingkat ketersediaan informasi pada sistem *online* untuk layanan yang diberikan.

7. Perilaku petugas (layanan tatap muka) atau kemudahan dan kejelasan fitur sistem *online* (layanan *online*)

a. Perilaku petugas (layanan tatap muka)

Aspek perilaku petugas didefinisikan sebagai persepsi pengguna layanan mengenai kepentingan terhadap penilaian perilaku petugas pada sebuah layanan serta penilaian kepuasan terhadap perilaku petugas yang diberikan.

b. Kemudahan dan kejelasan fitur sistem *online* (layanan *online*)

Aspek kemudahan dan kejelasan fitur sistem *online* didefinisikan sebagai persepsi pengguna layanan mengenai kepentingan terhadap kemudahan dan kejelasan fitur pada sebuah layanan serta penilaian kepuasan terhadap tingkat kemudahan dan kejelasan fitur sistem *online* untuk layanan yang diberikan.

8. Kualitas sarana dan prasarana

Aspek kualitas sarana dan prasarana didefinisikan sebagai persepsi pengguna layanan mengenai kepentingan terhadap kualitas sarana dan prasarana pada sebuah layanan serta penilaian kepuasan terhadap kualitas sarana dan prasarana yang sediakan.

9. Penanganan pengaduan

Aspek penanganan pengaduan didefinisikan sebagai persepsi pengguna layanan mengenai kepentingan terhadap keberadaan fasilitas dan penanganan pengaduan dalam sebuah layanan serta penilaian kepuasan terhadap fasilitas dan penanganan pengaduan yang diberikan.

Target yang digunakan dalam penilaian Indeks Kepuasan Layanan Sektor ESDM sebagai berikut:

Tabel IV-14 Indikator dan Target Kinerja Indeks Kepuasan Layanan Sektor ESDM

Indikator Kinerja/Komponen	Satuan	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Sasaran Strategis: Layanan Sektor ESDM yang Optimal						
Indeks Kepuasan Layanan Sektor ESDM	Indeks Skala 4	3,2	3,25	3,3	3,35	3,4

Sasaran Strategis 7: Perumusan Kebijakan dan Regulasi Sektor ESDM yang Berkualitas

Dalam rangka mengukur peningkatan kualitas perumusan kebijakan dan regulasi sektor ESDM, maka ditetapkan indikator kinerja yang dapat dijadikan instrumen penilaian yang terukur untuk mencapai sasaran tersebut. Indikator kinerja yang dimaksud yaitu Indeks Kualitas Kebijakan dan Indeks Implementasi Kebijakan.

Indeks Kualitas Kebijakan

Tujuan dari penilaian Indeks Kualitas Kebijakan adalah:

1. Mengetahui kualitas kebijakan sektor ESDM;
2. Menjadi instrumen untuk menilai kualitas kebijakan dalam rangka meningkatkan kualitas perumusan dan implementasi kebijakan;
3. Instrumen untuk menilai sasaran reformasi birokrasi, terkait dengan perbaikan kualitas kebijakan; dan
4. Acuan pembinaan dan peningkatan kualitas Analisis Kebijakan.

Metode penilaian dari Indeks Kualitas Kebijakan ini terdiri dari komponen-komponen utama dan pendukung. Adapun komponen-komponen tersebut, yaitu:

1. Perencanaan kebijakan

Penilaian komponen perencanaan kebijakan bertujuan untuk mengetahui proses identifikasi terhadap isu dan urgensi kebutuhan dari penyusunan sebuah kebijakan. Komponen ini terdiri dari 2 (dua) tahapan yaitu:

- a. Penilaian *agenda setting*, bertujuan untuk menilai kualitas isu kebijakan sebelum diformulasikan. Pada tahapan ini penilaian akan ditujukan terhadap hasil identifikasi permasalahan dari isu pokok kebijakan, hasil kajian terhadap isu-isu aktual, proses konsultasi publik terhadap isu dan metode *assessment* yang dilakukan terhadap setiap masukan;
- b. Penilaian formulasi kebijakan, bertujuan untuk melihat kualitas proses penyusunan kebijakan sebelum diimplementasikan. Pada tahapan ini, penilaian akan ditujukan pada proses penyusunan kebijakan seperti:
 - Tujuan kebijakan harus jelas dan memiliki orientasi jangka panjang (*forward looking*);
 - Mempertimbangkan berbagai perspektif (*outward looking*);
 - Disusun atas dasar evaluasi kebijakan terdahulu dan memiliki instrumen evaluasi yang terintegrasi dengan kebijakan itu sendiri (*learns lessons*);

- Mempertimbangkan sejumlah alternatif lainnya dan memperhitungkan risiko dari setiap alternatif (*innovative*);
- Didukung oleh basis data dan informasi yang valid dan dapat diandalkan (*evidence-based*); dan
- Tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan (*compliance*).

2. Pelaksanaan kebijakan

Penilaian komponen pelaksanaan kebijakan bertujuan untuk mengetahui efektivitas dari proses implementasi kebijakan serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi kebijakan. Komponen ini memiliki 2 (dua) tahapan yaitu:

- a. Penilaian implementasi kebijakan, bertujuan untuk melihat efektivitas dari pelaksanaan kebijakan dari segala aspek yang dapat dibuktikan melalui dokumen resmi dan dimensi yang terukur yaitu dimensi pengukuran meliputi dimensi perencanaan bahwa implementasi kebijakan harus didukung oleh upaya perencanaan yang tepat, dimensi kelembagaan bahwa implementasi kebijakan harus didukung oleh aspek kelembagaan yang baik dan dimensi komunikasi kebijakan bahwa implementasi kebijakan harus didukung oleh komunikasi kebijakan yang baik dalam lingkup internal maupun eksternal; dan
- b. Penilaian evaluasi kebijakan, bertujuan untuk melihat metode monitoring dan evaluasi dari setiap kebijakan serta ketepatan indikator-indikator yang digunakan. Pada tahapan ini, penilaian akan ditujukan pada seluruh aspek dari proses pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi kebijakan yang meliputi aspek efektivitas, efisiensi, dampak, serta keberlanjutan.

Tabel IV-15 Indikator dan Target Kinerja Sasaran Indeks Kualitas Kebijakan

Indikator Kinerja/Komponen	Satuan	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Sasaran Strategis: Perumusan Kebijakan dan Regulasi Sektor ESDM yang Berkualitas						
Indeks Kualitas Kebijakan	Indeks	62	65	70	74	78

Indeks Implementasi Kebijakan

Tujuan implementasi kebijakan sebagai acuan dalam mengukur respons masyarakat terhadap setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh KESDM yang menyentuh langsung kalangan masyarakat yang terpengaruh, meliputi:

1. Kesadaran masyarakat terhadap setiap kebijakan yang dikeluarkan;
2. Manfaat langsung yang dirasakan dengan adanya kebijakan tersebut;
3. Jangkauan manfaat dimana kebijakan ini dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat sekitar baik langsung maupun tidak langsung; dan
4. Dampak terhadap kebijakan, apakah mempengaruhi kualitas hidup masyarakat secara langsung atau memiliki efek yang baik untuk kehidupan.

Metode penilaian dari Indeks Implementasi Kebijakan ini terdiri dari komponen-komponen pembentuk yaitu:

1. Kesadaran
Merupakan penilaian terhadap kesadaran masyarakat untuk setiap kebijakan yang dikeluarkan;
2. Manfaat langsung
Merupakan penilaian terhadap manfaat langsung yang diterima masyarakat dengan adanya kebijakan tersebut;
3. Jangkauan manfaat
Merupakan penilaian terhadap lingkup jangkauan kebijakan yang dirasakan oleh seluruh masyarakat sekitar baik langsung maupun tidak langsung; dan
4. Dampak terhadap kebijakan
Merupakan penilaian terhadap dampak kebijakan terhadap kualitas hidup masyarakat secara langsung atau memiliki efek yang baik untuk kehidupan.

Adapun kebijakan KESDM yang menjadi bagian dari penilaian Indeks Implementasi Kebijakan pada tahun 2019 yaitu BBM satu harga, jargas kota, Penerangan Jalanan Umum (PJU) berbasis *solar system*, konverter kit untuk nelayan, LTSHE, dan penyediaan air bersih melalui sumur bor. Namun kebijakan yang menjadi penilaian tersebut dapat berubah sesuai dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh KESDM yang memiliki dampak langsung terhadap masyarakat dan telah berjalan kurang lebih dua tahun.

Indeks Implementasi Kebijakan KESDM ini dinilai berdasarkan hasil survei yang dilakukan kepada masyarakat dan memiliki akses terhadap setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh KESDM.

Tabel IV-16 Indikator dan Target Kinerja Indeks Implementasi Kebijakan

Indikator Kinerja/Komponen	Satuan	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Sasaran Strategis: Perumusan Kebijakan dan Regulasi Sektor ESDM yang Berkualitas						
Indeks Implementasi Kebijakan	Indeks	67,3	71,7	75,6	78,5	81,3

Untuk dapat mencapai target nilai Indeks Implementasi Kebijakan selama 5 (lima) tahun ke depan diperlukan sosialisasi kebijakan pada masyarakat terdampak, memberikan bantuan pada masyarakat secara tepat sasaran, meningkatkan kuantitas penerima manfaat, memberikan dampak manfaat yang lebih besar dan pengawasan serta evaluasi dalam pelaksanaannya.

Sasaran Strategis 8: Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Sektor ESDM yang Efektif

Dalam rangka mengukur efektivitas terhadap Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Sektor ESDM, maka ditetapkan indikator kinerja yang dapat dijadikan instrumen penilaian yang terukur untuk mencapai sasaran tersebut. Indikator kinerja yang dimaksud yaitu Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan, Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) KESDM. Untuk mengukur hal tersebut, maka ditentukan komponen-komponen pengungkit dari penilaian indeks dimaksud. Komponen-komponen tersebut yaitu:

1. Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan

Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan merupakan metode penilaian yang digunakan KESDM dalam meningkatkan efektivitas pembinaan dan pengawasan terhadap proses dari seluruh bidang usaha sektor ESDM. Adapun komponen penilaian dalam menentukan nilai indeks tersebut yaitu:

a. Subsektor Minyak dan Gas Bumi

Merupakan indikator penilaian terhadap pembinaan dan pengawasan subsektor minyak dan gas bumi (migas) mencakup Badan Usaha di hulu (eksplorasi, eksploitasi) dan hilir (pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, niaga) migas yang

mengacu pada UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi serta peraturan turunannya.

b. Subsektor Mineral dan Batubara

Merupakan indikator penilaian terhadap pembinaan dan pengawasan subsektor mineral dan batubara mencakup Pemerintah Daerah dan pada Badan Usaha ditujukan kepada Kepala Teknik Pertambangan, Izin Usaha Jasa Pertambangan, Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus (IUP OPK) Pengolahan dan Pemurnian, mengacu pada UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta peraturan turunannya.

c. Subsektor Ketenagalistrikan

Merupakan indikator penilaian terhadap pembinaan dan pengawasan Subsektor ketenagalistrikan mencakup Badan Usaha ketenagalistrikan (PT PLN (Persero), IPP, PPU) dan Badan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik yang mengacu pada UU Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan serta peraturan turunannya.

d. Subsektor EBTKE

Merupakan indikator penilaian terhadap pembinaan dan pengawasan subsektor EBTKE yang mengacu pada UU Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi; Permen ESDM Nomor 32 Tahun 2018 tentang Penyediaan, Pemanfaatan, dan Tata Niaga BBN sebagai Bahan Bakar Lain; Permen ESDM Nomor 39 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Fisik Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi; PP Nomor 70 Tahun 2009 tentang Konservasi Energi; Permen ESDM Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Energi dan peraturan turunannya.

Metode penilaian Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan yaitu melakukan survei terhadap Badan Usaha sektor ESDM (minyak dan gas bumi, mineral dan batubara, ketenagalistrikan, dan EBTKE) dengan mengambil sampel pada setiap jenis usaha dan subsektornya.

Untuk mencapai target Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan dalam periode tahun 2020-2024 diperlukan kegiatan pembinaan dan pengawasan yang lebih intensif, khususnya pada kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

a. Minyak dan gas bumi

Hulu: peningkatan produksi, peningkatan pemanfaatan gas bumi dalam negeri, kemudahan perizinan, verifikasi rencana impor barang, kaidah keteknikan yang baik, keselamatan kerja, pengelolaan data, program CSR, diseminasi informasi, bimbingan teknis (bimtek), dan penyuluhan.

Hilir: peningkatan ketersediaan produk BBM dan gas bumi, perizinan migas, keselamatan kerja, keteknikan yang baik, verifikasi rencana impor barang, program CSR, diseminasi informasi, bimtek dan penyuluhan.

b. Mineral dan Batubara

Penerapan aspek teknis pertambangan, penerapan aspek konservasi, keselamatan dan kesehatan kerja, pengelolaan lingkungan hidup, penerapan teknologi, pemasaran, akuntabilitas keuangan, pengelolaan data, pemanfaatan barang jasa dan teknologi, pemberdayaan masyarakat setempat, pengolahan dan/atau pemurnian, serta pendidikan dan pelatihan.

c. Ketenagalistrikan

Penyediaan dan pemanfaatan sumber energi untuk pembangkit tenaga listrik, pembangunan infrastruktur, kaidah keteknikan yang baik, kecukupan pasokan tenaga listrik, verifikasi rencana impor barang, penggunaan tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi, standar mutu pelayanan dan penyediaan tenaga listrik, pemenuhan persyaratan perizinan berusaha, pemenuhan ketentuan **peraturan** perundang-undangan dan tingkat mutu layanan badan usaha jasa penunjang tenaga listrik, penerapan harga jual tenaga listrik, sewa jaringan dan tarif tenaga listrik, diseminasi informasi, bimtek dan penyuluhan.

d. EBTKE

Aneka EBT

Penyediaan dan pemanfaatan sumber aneka EBT untuk pembangkit tenaga listrik, pengelolaan data badan usaha, kaidah keteknikan yang baik, penerapan studi kelayakan pembangunan pembangkit EBT, penggunaan tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi, tingkat mutu pelayanan penyediaan tenaga listrik dari pembangkit EBT, pemenuhan persyaratan perizinan berusaha, diseminasi informasi, bimtek, penyuluhan, pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja serta

pengelolaan lingkungan hidup, TKDN, dan kepatuhan terhadap kewajiban pelaporan pemanfaatan aneka EBT.

Bioenergi

Pemenuhan standar dan mutu BBN, kaidah keteknikan yang baik, pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja serta pengelolaan lingkungan hidup, TKDN, kompetensi tenaga kerja, kepatuhan terhadap kewajiban pelaporan, produksi distribusi dalam negeri dan ekspor, serta pemanfaatan BBN.

Konservasi Energi

Penggunaan energi pada industri penyedia energi, pemilihan penggunaan peralatan dan sarana, pengoperasian sistem, penerapan teknologi yang efisien, pelaksanaan audit energi, pelaksanaan rekomendasi hasil audit energi, pengawasan konservasi sumber daya energi, diseminasi informasi, bimtek, dan penyuluhan.

Panas Bumi

Pelaksanaan kegiatan usaha panas bumi, pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, SDM, barang dan jasa dalam negeri, keteknikan yang baik dan benar, pelaksanaan dan pengelolaan data, pemberdayaan masyarakat, serta pelaksanaan kewajiban atas penerimaan negara dan daerah.

2. Tingkat Maturitas SPIP

Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang dilakukan secara menyeluruh di lingkungan Pemerintah pusat dan daerah.

a. Lingkungan pengendalian

Merupakan penilaian terhadap kemampuan pimpinan dalam menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan dampak perilaku positif dan kondusif untuk penerapan sistem pengendalian intern dalam lingkungan kerjanya, melalui penegakan integritas dan etika, komitmen terhadap kompetensi, kepemimpinan yang kondusif, struktur organisasi sesuai kebutuhan, delegasi wewenang dan tanggung

jawab, kebijakan pembinaan SDM, peran APIP yang efektif, serta hubungan kerja yang baik.

b. Penilaian risiko

Merupakan penilaian terhadap kemampuan pimpinan dalam menetapkan tujuan Kementerian yang memuat pernyataan dan arahan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis, dan terikat waktu. Pernyataan dan arahan ini wajib dikomunikasikan kepada seluruh pegawai. Adapun parameter dari penilaian ini yaitu identifikasi dan analisis risiko.

c. Kegiatan pengendalian

Merupakan penilaian terhadap kemampuan pimpinan dalam melakukan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, serta sifat dari tugas dan fungsi Kementerian. Kegiatan pengendalian diutamakan pada kegiatan pokok Kementerian, dikaitkan dengan proses penilaian risiko, dipilih sesuai dengan sifat khusus Kementerian, serta kebijakan dan prosedur ditetapkan secara tertulis. Adapun kegiatan pengendalian yang dimaksud, dilaksanakan dengan reviu kinerja, pembinaan SDM, pengendalian sistem informasi, pengendalian fisik aset, penetapan persentase reviu indikator, pemisahan fungsi, otorisasi, pencatatan, pembatasan akses, akuntabilitas, dan dokumentasi Sistem Pengendalian Intern (SPI).

d. Informasi dan komunikasi

Merupakan penilaian terhadap kemampuan pimpinan dalam mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat. Komunikasi atas informasi tersebut harus diselenggarakan secara efektif, yaitu menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi serta mengelola, mengembangkan dan memperbarui sistem informasi secara terus-menerus dengan parameter penilaian mencakup informasi dan komunikasi efektif.

e. Pemantauan

Merupakan penilaian terhadap kemampuan pimpinan dalam melakukan pemantauan SPI yang dilakukan secara berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit serta reviu lainnya. Parameter penilaian mencakup pemantauan berkelanjutan dan evaluasi terpisah.

3. Nilai SAKIP KESDM

SAKIP merupakan penerapan pelaksanaan manajemen kinerja berupa rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang bertujuan untuk memastikan terdapat perbaikan berkelanjutan guna meningkatkan kinerja Kementerian/Lembaga sesuai dengan sasaran pembangunan nasional, pencapaian target-target, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi. Penerapan SAKIP dilakukan berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme, yang merupakan asas akuntabilitas dalam penyelenggaraan negara serta UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang merupakan asas pengelolaan keuangan negara adalah akuntabilitas berorientasi hasil dan penerapan anggaran berbasis prestasi kinerja. Kewajiban melaporkan akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja Pemerintah tercantum pada PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. SAKIP diperlukan untuk meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran berorientasi pada hasil yang tercantum pada Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Target Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan, Tingkat Maturitas SPIP, serta Nilai SAKIP KESDM adalah sebagai berikut:

Tabel IV-17 Indikator dan Target Kinerja Sasaran Strategi Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Sektor ESDM yang Efektif

Indikator Kinerja/Komponen	Satuan	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Sasaran Strategis: Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Sektor ESDM yang Efektif						
A. Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan	Indeks	75,5	76,5	77,5	78,5	79,5
B. Tingkat Maturitas SPIP	Level Skala 5	3,5	3,6	3,7	3,8	3,9
C. Nilai SAKIP KESDM	Nilai	78	80	81	82	83

Sasaran Strategis 9: Penelitian dan Pengembangan Sektor ESDM yang Produktif

Peranan penelitian dan pengembangan dalam mendukung pengembangan sektor ESDM akan dapat direalisasikan apabila hasil-hasil litbang dapat diimplementasikan (hilirisasi). Hasil-hasil litbang tersebut utamanya adalah yang dalam bentuk *prototype*, *pilot plant*,

demo plant dan paten, dari hasil inovasi teknologi serta kajian. Hasil litbang juga termasuk metode, rekayasa, dan jasa. Hasil-hasil litbang tersebut dapat diimplementasikan langsung oleh Kementerian ESDM, Pemerintah Daerah, dan Industri. Penggunaan hasil litbang diharapkan dapat mendukung kebijakan Pemerintah terutama di sektor ESDM sehingga dapat dirasakan oleh masyarakat. Implementasi hasil litbang oleh pihak industri diharapkan dapat menghasilkan peningkatan nilai tambah/*multiplier effect* dalam bentuk pengurangan biaya dan peningkatan efisiensi. Terlaksanakannya implementasi hasil-hasil litbang secara masif akan mampu mendukung upaya penciptaan lapangan kerja dan peningkatan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN). Dari hasil kegiatan litbang yang telah dilakukan Badan Litbang ESDM, pada saat ini ada beberapa yang sudah sampai pada tahapan implementasi yang nantinya diharapkan dapat dikembangkan pada skala industri dan komersialisasi. Untuk sampai pada tahapan tersebut, hasil litbang ini dilakukan pengujian skala industri agar lebih siap, baik secara teknologi maupun keekonomiannya. Dampak hasil litbang diharapkan dapat dirasakan langsung dan diintegrasikan dengan bisnis yang menguntungkan bagi investor.

Dalam rangka mengukur Penelitian dan Pengembangan ESDM yang Produktif, maka ditetapkan indikator kinerja yang dapat dijadikan instrumen penilaian yang terukur. Indikator kinerja yang dimaksud yaitu Jumlah Pemanfaatan Hasil Litbang. Untuk mengukur sejauhmana kegiatan litbang dilaksanakan, hasilnya berhasil dimanfaatkan/ diimplementasikan oleh pemangku kepentingan (*stake holders*) dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Hasil litbang strategis yang dimanfaatkan/diimplementasikan merupakan hasil litbang tahun-tahun sebelumnya dan bukan hasil litbang tahun berjalan;
- b. Hasil litbang telah digunakan untuk memproduksi oleh industri atau digunakan untuk menyusun kebijakan, atau untuk meningkatkan nilai tambah; dan
- c. Penggunaan hasil litbang dapat dilakukan melalui kontrak kerja sama.

Metode pengukuran indikator kinerja tersebut dengan melakukan perhitungan terhadap jumlah hasil litbang energi dan sumber daya mineral yang telah dimanfaatkan/ diimplementasikan oleh pemangku kepentingan (*stake holders*) pada tahun berjalan.

Tabel IV-18 Indikator dan Target Kinerja Sasaran Strategis Penelitian dan Pengembangan Sektor ESDM yang Produktif

Indikator Kinerja/Komponen	Satuan	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Sasaran Strategis: Penelitian dan Pengembangan Sektor ESDM yang Produktif						
Jumlah Pemanfaatan Hasil Litbang	Buah	8	9	11	11	12

Sasaran Strategis 10: Terwujudnya birokrasi yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima

Dalam rangka mengukur peningkatan nilai dari birokrasi yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima, maka ditetapkan indikator kinerja yang dapat dijadikan instrumen penilaian yang terukur untuk mencapai sasaran tersebut. Indikator kinerja yang dimaksud yaitu Indeks Reformasi Birokrasi. Indeks Reformasi Birokrasi merupakan penilaian terhadap evaluasi birokrasi yang berpedoman pada Permen PAN RB Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah. Evaluasi difokuskan pada upaya-upaya yang dilakukan oleh KESDM dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Tujuan evaluasi adalah untuk menilai kemajuan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka mencapai sasaran yaitu mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, serta birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik yang baik. Selain itu, evaluasi ini juga bertujuan untuk memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan KESDM. Untuk mengukur nilai reformasi birokrasi tersebut, maka ditentukan komponen-komponen pengungkit dari penilaian indeks tersebut. Komponen-komponen tersebut yaitu:

1. Manajemen Perubahan

Manajemen perubahan sebagai salah satu indikator untuk menilai perubahan secara sistematis dan konsisten dari sistem dan mekanisme kerja organisasi serta pola pikir dan budaya kerja individu atau unit kerja di dalamnya menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran RB.

2. Penataan Peraturan Perundang-Undangan

Penataan peraturan perundang-undangan sebagai salah satu indikator untuk menilai tingkat efektivitas pengelolaan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh instansi Pemerintah.

3. Penataan dan Penguatan Organisasi

Penataan dan penguatan organisasi sebagai salah satu indikator untuk menilai tingkat efisiensi dan efektivitas organisasi instansi

Pemerintah secara proporsional sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas masing-masing sehingga menjadi tepat fungsi.

4. Penataan Tata Laksana

Penataan tata laksana sebagai salah satu indikator untuk menilai tingkat efisiensi dan efektivitas sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur pada masing-masing instansi Pemerintah.

5. Penataan Sistem Manajemen SDM

Penataan sistem manajemen SDM sebagai salah satu indikator untuk menilai tingkat profesionalisme SDM pada masing-masing instansi Pemerintah.

6. Penguatan Akuntabilitas

Penguatan akuntabilitas sebagai salah satu indikator untuk menilai tingkat kapasitas dan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah.

7. Penguatan Pengawasan

Penguatan pengawasan sebagai salah satu indikator untuk menilai tingkat penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN pada masing-masing instansi Pemerintah.

8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Peningkatan kualitas pelayanan publik sebagai salah satu indikator untuk menilai tingkat kualitas pelayanan publik pada masing-masing instansi Pemerintah sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat.

Penilaian terhadap Indeks Reformasi Birokrasi KESDM ini nantinya akan dilakukan oleh Kementerian PAN RB dengan berbasis pada Nilai Akuntabilitas Kerja, Survei Internal Integritas Organisasi, Survei Eksternal Persepsi Korupsi, Opini BPK, dan Survei Eksternal Pelayanan Publik. Target Indeks Reformasi Birokrasi sebagai berikut:

Tabel IV-19 Indikator dan Target Kinerja Sasaran Strategis Terwujudnya Birokrasi Yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima

Indikator Kinerja/Komponen	Satuan	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Sasaran Strategis: Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima						
Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	80	85,1	85,5	90	95,5

Sasaran Strategis 11: Organisasi yang Fit dan SDM yang Unggul

Dalam rangka mengukur peningkatan kinerja dari organisasi KESDM untuk mewujudkan reformasi birokrasi, maka ditetapkan standar terbaik yang menjadi target terwujudnya organisasi KESDM yang sehat, kuat dan bersih. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka ditetapkan indikator kinerja yang dapat dijadikan instrumen penilaian yang terukur untuk mencapai sasaran tersebut. Indikator kinerja yang dimaksud yaitu Nilai Evaluasi Kelembagaan dan Indeks Profesionalitas ASN.

Nilai Evaluasi Kelembagaan

Penilaian evaluasi kelembagaan berpedoman kepada Permen PAN RB Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah. Evaluasi kelembagaan instansi Pemerintah dimaksudkan untuk dijadikan landasan bagi KESDM dalam memperbaiki, menyesuaikan, dan menyempurnakan struktur dan proses organisasi yang sesuai dengan lingkungan strategisnya. Pedoman evaluasi kelembagaan instansi Pemerintah mencakup dua dimensi pokok organisasi, yakni struktur dan proses organisasi. Dimensi struktur mencakup 3 (tiga) sub dimensi dan dimensi proses organisasi mencakup 5 (lima) sub dimensi sebagai berikut:

1. Dimensi Struktur Organisasi

Dalam dimensi struktur organisasi terdapat 3 (tiga) sub dimensi, yaitu kompleksitas, formalisasi, dan sentralisasi. Konsep ketiga dimensi tersebut diuraikan di bawah ini.

a. Sub Dimensi Kompleksitas

Kompleksitas adalah banyaknya tingkat diferensiasi yang dilakukan dalam pembagian kerja (*division of labor*). Pada umumnya organisasi Pemerintah memiliki kompleksitas yang tinggi karena beragamnya tugas dan fungsi yang dijalankan. Kompleksitas merujuk pada tingkat diferensiasi (pemisahan tugas-tugas) yang ada pada suatu organisasi. Semakin kompleks organisasi, semakin dibutuhkan koordinasi, kontrol, dan komunikasi yang efektif bagi unit-unit yang ada sehingga para pimpinan bisa memastikan bahwa setiap unit bekerja dengan baik. Diferensiasi atau pemisahan tugas-tugas merujuk pada 3 (tiga) hal, yaitu:

– Diferensiasi horizontal

Diferensiasi horizontal merupakan pemisahan tugas-tugas dalam struktur horizontal antar unit-unit organisasi berdasarkan perbedaan orientasi unit organisasi, tugas,

fungsi, pendidikan, keahlian, dan sebagainya. Pada organisasi Pemerintah, diferensiasi horizontal dipisahkan di antaranya berdasarkan visi dan misi Pemerintah pusat atau daerah, urusan Pemerintahan yang diselenggarakan, kewenangan yang dimiliki, dan pengelompokan bidang tugas organisasi.

– Diferensiasi vertikal

Diferensiasi vertikal merujuk pada tingkat hierarki organisasi. Semakin tinggi tingkat hierarki di dalam struktur organisasi, maka kompleksitasnya akan semakin tinggi dan potensi distorsi komunikasi dari manajemen tingkat tinggi hingga unit organisasi paling rendah akan semakin besar. Satu hal yang perlu diperhatikan dari diferensiasi ini adalah rentang kendali, yaitu seberapa banyak unit organisasi yang dapat dibentuk secara efektif oleh unit organisasi yang di atasnya. Semakin kompleks pekerjaan semakin kecil rentang kendali yang diperlukan dalam pengawasan. Dalam praktik penataan organisasi Pemerintah, perlu memperhatikan dimensi diferensiasi vertikal ini.

– Diferensiasi spasial

Diferensiasi spasial merujuk pada tempat kedudukan, fasilitas, dan penyebaran unit organisasi secara geografis. Semakin jauh dan semakin banyak tempat kedudukan, fasilitas, dan penyebaran unit organisasi secara geografis, maka akan semakin tinggi kompleksitas organisasi tersebut. Diferensiasi spasial merupakan pertimbangan penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia, khususnya dalam penataan kelembagaan instansi Pemerintah. Hal ini dikarenakan kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari berbagai pulau yang tersebar.

b. Sub Dimensi Formalisasi

Formalisasi merupakan suatu kondisi dimana aturan-aturan, prosedur, instruksi, dan komunikasi dibakukan. Formalisasi yang tinggi akan meningkatkan kompleksitas. Formalisasi merupakan sesuatu yang penting bagi organisasi karena dengan standarisasi akan dicapai produk yang konsisten dan seragam serta mengurangi kesalahan-kesalahan yang tidak perlu terjadi. Selain itu, formalisasi akan mempermudah koordinasi antar bagian/unit organisasi dalam menghasilkan

suatu produk atau jasa. Formalisasi di dalam restrukturisasi organisasi merupakan suatu proses penyeragaman melalui aturan-aturan, prosedur, instruksi, dan komunikasi yang telah dibakukan. Sebagai contoh ketentuan mengenai kelembagaan kementerian negara diatur dalam UU Nomor 39 Tahun 2008 dan Perpres Nomor 7 Tahun 2015.

c. Sub Dimensi Sentralisasi

Sentralisasi adalah tingkat dimana kewenangan (*authority*) dalam pengambilan keputusan-keputusan organisasi berada pada manajemen tingkat tinggi. Sentralisasi dapat diartikan sebagai tingkatan pengkonsentrasian kekuasaan secara formal. Sentralisasi dapat menurunkan tingkat kompleksitas dan menyederhanakan struktur organisasi. Semakin sederhana struktur organisasi akan semakin gesit gerak dan perkembangannya. Sedangkan bagi organisasi yang strukturnya besar, sentralisasi dapat mengakibatkan organisasi tersebut bergerak lamban. Di sisi lain, bertolak belakang dari sentralisasi adalah desentralisasi, yaitu pelimpahan wewenang pengambilan keputusan kepada unit organisasi tingkat bawah yang berada dekat dengan masyarakat. Desentralisasi menciptakan banyak spesialisasi atau kekhususan.

2. Dimensi Proses Organisasi

Dalam dimensi proses organisasi terdapat 5 (lima) sub dimensi, yaitu keselarasan (*alignment*), tata kelola (*governance*) dan kepatuhan (*compliance*), perbaikan dan peningkatan proses, manajemen risiko, dan teknologi informasi. Konsep kelima dimensi tersebut diuraikan di bawah ini.

a. Sub Dimensi Keselarasan (*Alignment*)

Keselarasan (*alignment*) antara strategi organisasi dengan visi, tujuan, dan misi organisasi. Strategi organisasi pada dasarnya merupakan pedoman di dalam mengimplementasikan proses organisasi. Di dalam strategi organisasi dirumuskan berbagai sasaran strategis organisasi dan proses organisasi dilaksanakan dan dikembangkan untuk mencapai berbagai sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan visi dan tujuan pokok organisasi. Selain dimaksudkan untuk mencapai sasaran strategis organisasi, di dalam implementasinya proses organisasi juga harus memiliki keselarasan dengan struktur organisasi.

b. Sub Dimensi Tata Kelola (*Governance*) dan Kepatuhan (*Compliance*)

Tata kelola (*governance*) dan kepatuhan (*compliance*) yang dimaksudkan untuk memastikan apakah seluruh elemen pokok di dalam organisasi telah menempati kedudukan dan menjalankan peran sesuai dengan struktur yang disepakati dan berlaku di organisasi. Dalam perspektif ini seluruh pengambilan dan pelaksanaan keputusan organisasi telah berjalan sesuai dengan prinsip tata kelola (*governance*) yang mencakup transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi (kemandirian), dan kewajaran (*fairness*). Di dalam penerapannya, aspek tata kelola organisasi tidak dapat dipisahkan dengan aspek kepatuhan (*compliance*), yakni sejauh mana seluruh elemen organisasi bersinergi di dalam melaksanakan proses organisasi sesuai dengan dan patuh terhadap berbagai ketentuan dan regulasi yang berlaku, baik secara internal maupun eksternal.

c. Sub Dimensi Perbaikan dan Peningkatan Proses

Dimensi proses harus menyesuaikan terhadap tuntutan perubahan lingkungan. Dalam perspektif ini proses organisasi umumnya berlaku efektif hanya dalam kurun waktu tertentu. Akibat perubahan lingkungan, proses organisasi dapat menjadi tidak relevan dan membutuhkan pembaharuan. Dalam kaitan ini, setiap organisasi dituntut untuk melakukan evaluasi dan inovasi secara berkelanjutan terhadap proses yang diterapkan, dengan harapan proses organisasi dapat tetap relevan dan optimal untuk menciptakan rangkaian nilai (*value chain*) dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

d. Sub Dimensi Manajemen Risiko

Manajemen risiko adalah upaya untuk melakukan identifikasi, penilaian, dan penentuan prioritas risiko dan diikuti oleh penerapan sumber daya yang terkoordinasi serta ekonomis untuk meminimalkan, memantau, dan mengendalikan probabilitas atau dampak kejadian yang tidak menguntungkan. Tujuannya adalah untuk memastikan ketidakpastian agar tidak menghalangi pencapaian tujuan organisasi.

e. Sub Dimensi Teknologi Informasi

Kemajuan teknologi membawa peluang besar serta tantangan bagi semua bentuk organisasi tidak terkecuali organisasi

Pemerintah. Dalam skenario ekonomi global yang kompetitif saat ini, organisasi yang gagal maju secara teknologi berpotensi mengalami risiko tertinggal dibandingkan dengan organisasi lain dalam hal persaingan dan produktivitas. Oleh karena itu, saat ini seluruh organisasi Pemerintah telah berupaya untuk mengadopsi teknologi di dalam membantu pelaksanaan tugas dan fungsinya, khususnya teknologi informasi. Di dalam penggunaan teknologi informasi bagi organisasi Pemerintah, agar implementasinya dapat berjalan dengan baik, memerlukan adanya suatu perencanaan yang strategis mulai dari kebijakan pengaturan, integrasi, dan interoperabilitas.

Metode yang digunakan dalam melaksanakan evaluasi kelembagaan adalah metode survei yaitu persepsi kelompok (per-Eselon I) di dalam organisasi mengenai kondisi organisasi saat ini. Target Indikator Nilai Evaluasi Kelembagaan sebagai berikut:

Tabel IV-20 Indikator dan Target Kinerja Indikator Nilai Evaluasi Kelembagaan

Indikator Kinerja/Komponen	Satuan	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Sasaran Strategis: Organisasi yang Fit dan SDM yang Unggul						
Nilai Evaluasi Kelembagaan	Nilai	73,25	74	74	74	75

Indeks Profesionalitas ASN

Dalam rangka meningkatkan profesionalitas pegawai KESDM, maka disusun kebijakan-kebijakan pengelolaan SDM yang diukur melalui suatu Indeks Profesionalitas ASN KESDM. Indikator kinerja yang dimaksud yaitu Indeks Profesionalitas ASN.

Berdasarkan Permen PAN RB Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara, Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai dalam melaksanakan tugas jabatannya. Melalui Indeks Profesionalitas ASN, diharapkan tingkat profesionalitas ASN KESDM sebagai pelayan publik terus meningkat, dan terus dikembangkan sesuai dengan bidang spesialisasinya.

Komponen-komponen Indeks Profesionalitas ASN di antaranya:

1. Dimensi kualifikasi
Merupakan riwayat pendidikan formal terakhir yang dicapai oleh seorang ASN, mulai dari jenjang tertinggi sampai jenjang terendah. Bobot dimensi kualifikasi adalah 25% dari 100% nilai profesionalitas.
2. Dimensi kompetensi
Merupakan indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan pegawai, baik itu diklat kepemimpinan, fungsional, teknis, dan seminar. Bobot dimensi kompetensi adalah 40% dari 100% nilai profesionalitas.
3. Dimensi kinerja
Merupakan indikator penilaian prestasi kinerja pegawai. Penilaian kinerja pegawai meliputi aspek sasaran kinerja pegawai dan perilaku kerja. Bobot dimensi kinerja adalah 30% dari 100% nilai profesionalitas.
4. Dimensi disiplin
Merupakan indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami pegawai. Bobot dimensi disiplin adalah 5% dari 100% nilai profesionalitas.

Adapun target Indeks Profesionalitas ASN sebagai berikut:

Tabel IV-21 Indikator dan Target Kinerja Indeks Profesionalitas ASN

Indikator Kinerja/Komponen	Satuan	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Sasaran Strategis: Organisasi yang Fit dan SDM yang Unggul						
Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	71	73	75	78	82

Target-target pengembangan SDM yang diukur melalui Indeks Profesionalitas ASN KESDM adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan kualitas pegawai melalui peningkatan penyertaan tugas belajar;
- b. Pengembangan kompetensi pegawai melalui program pengembangan kompetensi yaitu peningkatan penyelenggaraan diklat tepat guna dan tepat sasaran, meliputi diklat kepemimpinan bagi pejabat struktural, diklat fungsional bagi pejabat fungsional, pemenuhan diklat 20 jam pelajaran bagi seluruh pegawai sesuai dengan bidang tugasnya, serta pengikutsertaan pegawai pada seminar-seminar sesuai bidang keahliannya;

- c. Peningkatan kinerja pegawai sesuai dengan PP Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil; dan
- d. Peningkatan disiplin pegawai.

Sasaran Strategis 12: Optimalisasi Teknologi Informasi yang Terintegrasi

Dalam rangka mengukur peningkatan layanan sektor ESDM terkait dengan penggunaan teknologi informasi yang terintegrasi, maka ditetapkan indikator kinerja yang dapat dijadikan instrumen penilaian yang terukur untuk mencapai sasaran tersebut. indikator kinerja yang dimaksud yaitu Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Aspek penilaian dari Indeks SPBE adalah:

1. Kebijakan internal tata kelola SPBE;
2. Kebijakan internal layanan SPBE;
3. Kelembagaan;
4. Strategi dan perencanaan;
5. Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK);
6. Layanan administrasi Pemerintahan berbasis elektronik; dan
7. Layanan publik berbasis elektronik;

Target Indeks SPBE sebagai berikut:

Tabel IV- 22 Indikator dan Target Kinerja Sasaran Strategis Optimalisasi Teknologi Informasi yang Terintegrasi

Indikator Kinerja/Komponen	Satuan	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Sasaran Strategis: Optimalisasi Teknologi Informasi yang Terintegrasi						
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks Skala 5	3,9	4,0	4,1	4,2	4,3

Sasaran Strategis 13: Pengelolaan Sistem Anggaran yang Optimal

Dalam rangka mengukur optimalisasi pengelolaan sistem anggaran KESDM, maka ditetapkan indikator kinerja yang dapat dijadikan instrumen penilaian yang terukur untuk mencapai sasaran tersebut. Indikator kinerja yang dimaksud yaitu nilai capaian IKPA dan Opini BPK RI atas laporan keuangan KESDM.

Target yang digunakan dalam penilaian IKPA dan Opini BPK sebagai berikut:

Tabel IV-23 Indikator dan Target Kinerja Sasaran Strategis Pengelolaan Sistem Anggaran yang Optimal

No.	Indikator Kinerja/Komponen	Satuan	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
Sasaran Strategis: Pengelolaan Sistem Anggaran yang Optimal							
1.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	Nilai	90	90,25	90,5	90,75	91
2	Opini BPK RI atas Laporan Keuangan KESDM	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

IV.2. Kerangka Pendanaan

Sumber pendanaan pembangunan sektor ESDM utamanya dari investasi swasta dan selebihnya dari APBN. Dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan, arah pembangunan lebih kepada infrastruktur ketenagalistrikan, energi terbarukan dan hilir migas serta pengolahan dan pemurnian mineral. Investasi swasta dan pendanaan APBN tersebut akan berdampak pada pencapaian ketahanan energi dan penerimaan negara yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional. Perkiraan pembiayaan sektor ESDM tahun 2020-2024 dari APBN sekitar Rp33,3 triliun dan dari investasi swasta sebesar USD191,71 Miliar. Pada tahun 2020 terjadi efisiensi anggaran dalam rangka mengantisipasi dampak pandemi global COVID-19 dari yang semula sebesar Rp9,7 Triliun menjadi Rp6,2 Triliun.

Kebutuhan pendanaan dari APBN untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis KESDM sampai dengan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel IV- 24 Rencana Kebutuhan Pendanaan KESDM 2020-2024

No.	Unit KESDM	2020	2021	2022	2023	2024
dalam Miliar Rupiah						
1	Sekretariat Jenderal	387,08	437,14	464,14	499,90	515,82
2	Inspektorat Jenderal	120,66	131,71	163,50	173,36	182,72
3	Ditjen Minyak dan Gas Bumi	2.013,62	1.995,37	465,64	466,31	475,25
4	Ditjen Ketenagalistrikan	125,58	174,98	273,18	294,52	320,08
5	Ditjen Mineral dan Batubara	445,99	486,86	455,90	458,90	458,90
6	Ditjen EBTKE	802,38	1.150,63	1.065,58	1.048,38	1.005,45
7	Badan Geologi	767,68	1.002,60	1.295,18	1.424,70	1.567,17
8	Badan Litbang ESDM	576,93	541,77	748,67	738,84	761,90
9	BPSDM ESDM	599,98	527,26	1.036,07	1.029,24	1.044,05
10	Setjen DEN	49,05	49,81	49,81	49,81	49,81
11	BPH Migas	249,70	271,17	250,64	251,86	253,13
12	Badan Pengelola Migas Aceh	77,79	69,10	130,59	143,68	161,48
Total		6.216,44	6.838,40	6.398,90	6.579,50	6.795,76

Investasi sektor ESDM untuk 5 (lima) tahun ke depan diperkirakan sebesar USD191,39 Miliar yang berasal dari subsektor migas yaitu sebesar 55%, subsektor ketenagalistrikan sekitar 20%, subsektor mineral dan batubara sekitar 13%, dan subsektor EBTKE sekitar 11%.

Tabel IV- 25 Investasi ESDM 2020-2024 (dalam Miliar USD)

Subsektor	2020	2021	2022	2023	2024
Minyak dan Gas Bumi	14,54	18,60	22,59	25,16	25,24
Ketenagalistrikan	11,95	9,91	7,55	6,64	3,10
Mineral dan Batubara	7,74	5,69	4,35	3,22	3,17
EBTKE	2,31	2,92	5,56	3,62	7,53
Total	36,54	37,12	40,05	38,64	39,04

Data lengkap terkait indeks kinerja KESDM dan kerangka pendanaan dicantumkan dalam dokumen Matriks Kinerja dan Pendanaan KESDM Tahun 2020-2024 pada halaman 227.

BAB V
PENUTUP

Renstra KESDM tahun 2020-2024 merupakan penjabaran dari visi-misi, tujuan dan sasaran strategis dalam mendukung tujuh agenda pembangunan nasional, dimana KESDM berkontribusi pada lima agenda yaitu:

1. Agenda 1 : Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas;
2. Agenda 2 : Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Agenda 3 : Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Agenda 5 : Memperkuat Infrastruktur Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar; dan
5. Agenda 6 : Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim.

Dokumen ini merupakan pedoman bagi KESDM dalam mewujudkan visi-misi dan arahan Presiden, yaitu:

1. Pembangunan SDM
Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerja sama industri dari talenta global.
2. Pembangunan Infrastruktur
Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.
3. Penyederhanaan Regulasi
Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan *Omnibus Law* antara lain dengan menyusun RUU tentang Cipta Kerja.
4. Penyederhanaan Birokrasi
Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang dan menyederhanakan eselonisasi.
5. Transformasi Ekonomi
Melakukan transformasi ekonomi dan ketergantungan sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Untuk mewujudkan visi dilaksanakan melalui 6 (enam) upaya yaitu:

1. Meningkatkan kualitas SDM melalui penerapan nilai-nilai KESDM (Jujur, Profesional, Melayani, Inovatif dan Berarti) dan mampu bekerja secara Cepat, Cermat dan Produktif;
2. Mengoptimalkan pengelolaan dan meningkatkan nilai tambah energi dan mineral yang berkelanjutan;
3. Mengakselerasi pemanfaatan energi baru, energi terbarukan dan konservasi energi;
4. Menjamin ketersediaan energi nasional;
5. Meningkatkan aksesibilitas energi dengan harga terjangkau kepada seluruh masyarakat; dan
6. Menyediakan data dan informasi vulkanologi, pergerakan tanah dan likuifaksi yang cepat dan akurat.

Sehingga dapat mencapai 4 (empat) tujuan yaitu:

1. Meningkatkan kemandirian dan ketahanan energi;
2. Optimalisasi pengelolaan energi dan mineral yang berkelanjutan dalam rangka meningkatkan nilai tambah;
3. Penguatan kapasitas organisasi dalam rangka menjadi penggerak utama sektor ESDM; dan
4. Ketersediaan data dan informasi mitigasi dan penanggulangan kebencanaan geologi yang cepat dan akurat.

Yang dijabarkan melalui serangkaian arah kebijakan dan strategi dengan menanamkan nilai-nilai KESDM yaitu jujur, profesional, melayani, inovatif dan berarti, untuk mencapai 13 (tiga belas) sasaran strategis yaitu:

1. Meningkatnya kemandirian dan ketahanan energi nasional;
2. Optimalisasi ketersediaan pasokan mineral;
3. Meningkatnya pelayanan mitigasi bencana geologi;
4. Meningkatnya kompetensi SDM sektor ESDM;
5. Optimalisasi kontribusi sektor ESDM yang bertanggung jawab dan berkelanjutan;
6. Layanan sektor ESDM yang optimal;
7. Perumusan kebijakan dan regulasi sektor ESDM yang berkualitas;
8. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sektor ESDM yang efektif;
9. Penelitian dan pengembangan sektor ESDM yang produktif;
10. Terwujudnya birokrasi yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima;
11. Organisasi yang fit dan SDM yang unggul;
12. Optimalisasi teknologi informasi yang terintegrasi; dan
13. Pengelolaan sistem anggaran yang optimal.

MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN KESDM TAHUN 2020-2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcomes) / Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Alokasi (dalam miliar rupiah)					Target	Unit
			2020	2021	2022	2023	2024		
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	1 Meningkatkan Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional - Indeks Kemandirian Energi Nasional (Skala 100) - Indeks Ketahanan Energi Nasional (Skala 1000)		59,95	59,77	59,95	60,16	61,49	Bejen KESDM, Ditjen Migas, Ditjen Mineral, Ditjen Ketenagalistrikan, Ditjen EBTKE, Bagecol, Balibang, Sejen DEN, BPH Migas, dan BPMA	
			72,06	72,46	72,44	72,29	73,03		
			75,04	75,53	77,63	78,86	79,42		
	2 Optimalisasi Ketercukupan Pasokan mineral - Indeks Pasokan Mineral untuk Peningkatan Nilai Tambah Dalam Negeri (Skala 100)		54,80	57,66	60,449	63,22	66,18	Ditjen Mineral	
	3 Meningkatkan Pelayanan Mitigasi Bencana Geologi - Indeks Mitigasi Bencana Geologi (Skala 100)		40,766	50,985	60,012	70,655	83,364	Badan Geologi	
	4 Meningkatkan Kompetensi SDM - Jumlah Pengembangan SDM yang Kompeten dan Profesional (Orang)		88,0	90,0	92,0	93,0	95,0	BPSDM ESDM	
			86,0	88,0	87,0	87,0	87,0		
	5 Optimalisasi Kontribusi Sektor ESDM yang Bertanggung Jawab dan Berkelanjutan - Persentase Realisasi PNEP (%) - Persentase Realisasi Investasi Sektor ESDM (%)		3,20	3,25	3,30	3,35	3,40	Seluruh Unit	
	6 Layanan Sektor ESDM yang Optimal - Indeks Kepuasan Layanan Sektor ESDM (Skala 4)		62,0	65,0	70,0	74,0	78,0	Sejen, Ditjen Migas, Ditjen Mineral, Ditjen Ketenagalistrikan, & Ditjen EBTKE	
			67,3	71,7	75,6	78,5	81,3		
7 Perumitan Kebijakan dan Regulasi Sektor ESDM yang Berkelanjutan - Indeks Kualitas Kebijakan (Skala 100) - Indeks Implementasi Kebijakan (Skala 100)		75,5	76,5	77,5	78,5	79,5	Seluruh Unit		
		3,5	3,6	3,7	3,8	3,9			
8 Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian Sektor ESDM yang Efektif - Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan (Skala 100) - Tingkat Maturitas SPP (Level Skala 5) - Nilai SAKIP KESDM (Skala 100)		78,0	80,0	81,0	82,0	83,0	Seluruh Unit		
9 Peningkatan dan Pengembangan ESDM yang Produktif - Jumlah Pemanfaatan Hasil Litbang (buah)		8	9	11	11	12	Balibang ESDM		
10 Perwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi Pelayanan Prima - Indeks Reformasi Birokrasi (Skala 100) (Nilai)		80,0	85,1	85,5	90,0	95,5	Seluruh Unit		
11 Optimalisasi yang PT dan SDM Unggul - Nilai Evaluasi Kelembagaan (Skala 100) - Indeks Profesionalitas ASN (Skala 100)		73,25	74,0	74,0	74,0	75,0	Seluruh Unit		
		71,0	73,0	75,0	78,0	82,0			
12 Optimalisasi Teknologi Informasi yang Terintegrasi - Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) (Skala 5)		3,9	4,0	4,1	4,2	4,3	Bejen KESDM		
13 Pengelolaan Sistem Anggaran yang Optimal - Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (RPA) (Skala 100) - Operasi BPK RI Atas Laporan Keuangan KESDM (predikat)		90	90,25	90,5	90,75	91	Seluruh Unit		
		WTP	WTP	WTP	WTP	WTP			

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target				Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana												
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022		2023	2024										
PROGRAM ENERGI DAN KETENAGALISTRIKAN																							
DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI																							
Sasaran Program 1	Terwujudnya ketahanan dan kemandirian energi migas melalui pasokan migas yang memadai dan dapat diakses masyarakat pada harga yang terjangkau secara berkelanjutan																					DME, DMO, DMEB, DMI	
Indikator Sasaran Program	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	A. Indeks Ketersediaan Hulu Migas (Indeks Skala ≥ 1)		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	- Produksi Minyak Bumi (MBOPD)		755	716	727	743	743	743	743	743	743	743	743	743	743	743	743	743	743	743	743	743	
	- Produksi Gas Bumi (MBOEPD)		1.191	1.261	1.281	1.286	1.286	1.286	1.286	1.286	1.286	1.286	1.286	1.286	1.286	1.286	1.286	1.286	1.286	1.286	1.286	1.286	
	- Persentase Pemenuhan Gas Bumi Domestik (%)		64	65	66	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	
	- Deviasi Kuantitas Ekspor Minyak Mentah dari Kuantitas yang Direkomendasikan (%)		15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	- Deviasi Kuantitas Ekspor LNG skema hulu dari kuantitas yang direkomendasikan (%)		15	14	13	12	10							
	B. Indeks Ketersediaan BBM (Indeks Skala ≥ 1)		1	1	1	1	1							
	- Produksi BBM dan Hasil Olahan (BOPD)		767.680	767.680	767.680	824.680	990.680							
	- Deviasi Kuantitas Impor Minyak Mentah untuk Feedstock Kilang dari Kuantitas yang Direkomendasikan (%)		30	27	25	20	15							
	- Deviasi Kuantitas Impor BBM dari Kuantitas yang Direkomendasikan (%)		30	27	25	20	15							
	- Deviasi Kuantitas Ekspor BBM dari Kuantitas yang Direkomendasikan (%)		30	27	25	20	15							
	C. Indeks Ketersediaan LPG (Indeks Skala ≥ 1)		1	1	1	1	1							
	- Produksi LPG (Juta Ton)		1,97	1,97	1,97	1,97	1,97							
	- Deviasi kuantitas Impor LPG dari kuantitas yang direkomendasikan (%)		20	17	15	12	10							

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target				Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana	
			2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023		2024
	- Deviasi kuantitas ekspor LPG dari kuantitas yang direkomendasikan (%)		30	27	25	22	20					
	D. Pemasokan Elpiji 3 kg bagi Masyarakat, Usaha Mikro, Nelayan, dan Petani Sasaran (Ribu Ton)		7000	7364-7399	7754-7836	8165-8431	8614-8870					
	- Persentase Realisasi Volume LPG Bersubsidi terhadap Kuota Yang Ditetapkan (%)		100	100	100	100	100					
	E. Indeks Ketersediaan LNG (Indeks Skala z 1)		1	1	1	1	1					
	- Produksi LNG (Juta Ton)		17,05	17,05	17,05	17,05	17,05					
	- Deviasi Kuantitas Ekspor LNG Skema Hilir (Trading) dari Kuantitas yang Direkomendasikan (%)		15	14	13	12	10					
	F. Reserve to Production Ratio Minyak/Gas Bumi (tahun)		8,01/19,10	7,41/17,14	6,31/15,89	5,20/14,83	4,18/13,58					
	- Persentase WK Migas Konvensional yang diminati terhadap Jumlah WK Migas Konvensional yang ditawarkan (%)		60	60	60	60	60					

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	- Persentase WK Migas Non-Konvensional Yang Diminati Terhadap Jumlah WK Migas Non-Konvensional yang Ditawarkan (%)		50	50	50	50	50							
	- Jumlah Sumber Daya Migas Pada Masa Eksplorasi (BBOE)		70	70,35	70,70	71,06	71,41							
	- Jumlah Rekomendasi POD 1 yang disetujui oleh Dirjen		2	2	2	3	2							
	- Jumlah Evaluasi Persetujuan Pengalihan Participating Interest 10%		2	2	2	2	2							
	- Jumlah WK yang kontraknya diperpanjang/alih kebela		2	2	2	2	2							
	- Jumlah Cadangan Miryak Bumi (MMSTB)		2212,1	1935,7	1674,4	1409,1	1.137,9							
	- Jumlah Cadangan Gas Bumi (TCF)		47,1	44,6	42,0	39,4	36,7							
	G. Jumlah Hari Cadangan BBM Operasional (hari)		23	23	23	23	23							
	H. Jumlah Hari Cadangan LPG Operasional (hari)		14	14	14	14	14							

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	1. Persentase Rekomendasi kebijakan dan Dokumen Perencanaan yang Diterima Oleh Stakeholder (%)		80	82	84	86	88						DMBS
	2 Akumulasi Formulasi Harga Migas terhadap Harga yang Ditetapkan (%)		91,25	91,75	92,25	92,75	93,25						
	- Deviasi Penetapan Harga Minyak Mentah Indonesia (ICP)		5	5	5	5	5						
	- Deviasi Harga Gas Skema Huhu (Gas Pipa,LNG, LPG dan Gas Suar)		0	0	0	0	0						
	- Deviasi Harga Jual Eceran BBM dan LPG		0	0	0	0	0						
	- Deviasi Harga Gas Hillir(%)		30	28	26	24	22						
	3 Indeks Aksesibilitas Migas (Skala 100)		74	75	87	85	91						
	A. Penyediaan Paket Konversi Minyak Tanah ke LPG Tabung 3 Kg (Paket)		-	-	1.106.905	-	-						
	- Persentase Kesesuaian Perencanaan Konversi Mitan ke LPG 3 kg terhadap Roadmap(%)		100	100	100	100	100						

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	- Persentase Realisasi Jumlah dan Kesesuaian Wilayah Penerima Paket Konversi Miliran ke LPG 3 KG(%)		100	100	100	100	100	100	100	100	100			
	B. Penyediaan Konverter Kit BBM ke Bahan Bakar Gas untuk Nelayan (Paket)		-	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000			
	- Persentase Kesesuaian Perencanaan Jumlah dan Kesesuaian Wilayah Penerima Konkit BHM ke BBG terhadap Roadmap untuk Nelayan(%)		100	100	100	100	100	100	100	100	100			
	- Persentase Realisasi Jumlah dan Kesesuaian Wilayah Penerima Konverter Kit BBM ke BBG terhadap Roadmap untuk Nelayan(%)		100	100	100	100	100	100	100	100	100			
	C. Penyediaan Konverter Kit BBM ke Bahan Bakar Gas untuk Petani (Paket)		-	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000			
	- Persentase Kesesuaian Perencanaan Jumlah dan Kesesuaian Wilayah Penerima Konkit BHM ke BBG terhadap Roadmap untuk Petani(%)		100	100	100	100	100	100	100	100	100			

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	- Persentase Realisasi Jumlah dan Kesesuaian Wilayah Persema Konverter Kit BBM ke BBG terhadap Roadmap untuk Petani(%)		100	100	100	100	100	100	100	100	100			
	D. Infrastruktur Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga (APBN) (SR)		127.864	138.206	100.000									
	- Infrastruktur Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga (KPBL) (SR)		-	50.000	839.555	800.000	800.000							
	- Persentase Kesesuaian Dokumen FEED / DEDC, UKL/UPL terhadap Roadmap Jaringan Gas (%)		100	100	100	100	100	100	100	100	100			
	- Persentase Pengadaan Jaringan Gas yang Berhasil terhadap Total Pengadaan Jaringan Gas yang Dilakukan(%)		100	100	100	100	100	100	100	100	100			
	- Persentase Kesesuaian Jumlah dan Kualitas Jaringan Gas yang Dibangun terhadap Dokumen Pelaksanaan Pembangunan (%)		100	100	100	100	100	100	100	100	100			
	- Persentase Realisasi Pembangunan Jaringan Rumah Tangga terhadap Dokumen Pengadaan (%)		100	100	100	100	100	100	100	100	100			

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target				Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana							
			2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023		2024						
	- Persentase Utilisasi Jaringan Rumah Tangga pada Tahun Berjalan(%)		100	100	100	100	100	100	100	100								
	E. Studi Pendahuluan Pembangunan Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga melalui Skema KPBU (Lokasi)		8	10	8	8	8	8	8	8								
	F. Indeks Fasilitas Niaga Migas (Indeks Skala 100)		100	100	100	100	100	100	100	100								
	- Kapasitas Fasilitas Penyimpanan Niaga LPG (ton)		397	401	405	409	413	413	413	413								
	- Kapasitas Fasilitas Filling Station Niaga LPG (ton/d)		804	820	820	837	837	837	837	837								
	- Kapasitas Fasilitas Filling Station Niaga LNG (MMSCFD)		35	40	45	45	45	45	45	45								
	- Kapasitas Fasilitas Mother Station Niaga CNG (MMSCFD)		119	121	125	128	130	130	130	130								
	- Kapasitas Fasilitas Niaga Gas Bumi (Km)		6497	6516	6536	6555	6575	6575	6575	6575								
	- Kapasitas Fasilitas Niaga Minyak Bumi, BBM dan Hasil Olahahan (KL)		764.347	779.634	795.227	811.131	827.354	827.354	827.354	827.354								
	G. Indeks Fasilitas Pengangkutan Migas (Indeks Skala 100)		100	100	100	100	100	100	100	100								

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target				Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana									
			2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023		2024								
	- Kapasitas Fasilitas Pengangkutan Minyak Bumi, BBM dan Hasil Olahahan (KL)		500	500	500	500	500	500	500	500										
	- Kapasitas Fasilitas Pengangkutan LPG (mton)		100	100	100	100	100	100	100	100										
	- Kapasitas Fasilitas Pengangkutan CNG (m3)		50	50	50	50	50	50	50	50										
	- Kapasitas Fasilitas Pengangkutan LNG (m3)		50	50	50	50	50	50	50	50										
	- Kapasitas Fasilitas Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa (MMSCFD)		100	100	100	100	100	100	100	100										
	H. Indeks Fasilitas Pengolahan Migas (Indeks Skala 100)		60	59	59	59	59	59	59	62										
	- Kapasitas Terpasang Kilang BBM (ribu BCFD)		1.151	1.151	1.176	1.276	1.276	1.276	1.276	1.276										
	- Kapasitas Terpasang Kilang Gas Bumi LNG (Juta Ton)		31,24	31,24	31,24	31,24	31,24	31,24	31,24	31,24										
	- Kapasitas Terpasang Kilang Gas Bumi LPG (Juta Ton)		3,88	3,88	3,88	3,88	3,88	3,88	3,88	3,88										
	- Indeks Fasilitas Penyimpanan Migas (Indeks Skala 100)		100	100	100	100	100	100	100	100										
	- Kapasitas Fasilitas Penyimpanan Minyak Bumi, BBM dan Hasil Olahahan (KL)		7.039.678	7.045.678	7.052.678	7.060.678	7.060.678	7.060.678	7.060.678	7.070.678										

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	- Kapasitas Fasilitas Penyimpanan LNG (m3)		835.626	850.626	850.626	850.626	850.626							
	- Kapasitas Fasilitas Penyimpanan LPG (ton)		522.457	523.057	523.757	524.557	525.557							
	- Kapasitas Fasilitas Penyimpanan CNG (m3)		1.005.780	1.005.780	1.005.780	1.005.780	1.005.780							
	J. Fasilitas Peningkatan Infrastruktur Kilang Minyak Bumi (Tabapau)	Regulasi dan Perizinan:- Keputusan Menteri ESDM Nomor 1000/K/10/ME M/2020 tentang Peningkatan kapasitas kilang minyak bumi kepada PT Pertamina (Persero) dalam Persempangan dan Pengoperasian Kilang Minyak di Balongan, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat;-	1.005.780	1.005.780	1.005.780	1.005.780	1.005.780	1.005.780	1.005.780	1.005.780	1.005.780	1.005.780	1.005.780	1.005.780

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target				Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana				
			2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023		2024			
			AS /2020 tanggal 3 Juni 2020;- Penyesuaian perizinan untuk kilang GRR dan RDMP	60	61	62	63	64							
4	Persentase Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam Kegiatan Usaha Hulu Migas (%)														
Kegiatan 1	Penyiapan Kebijakan dan Optimalisasi Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi														
Sasaran Kegiatan	Perumusan Kebijakan dan Perencanaan Program Migas yang Berkualitas														
1	Persentase Rekomendasi kebijakan dan Dokumen Perencanaan yang Diterima Oleh Stakeholder(%)		80	82	84	86	88								DMBP
Sasaran Kegiatan	Meningkatnya Akurasi Formulasi Harga Minyak Mentah														
Indikator Sasaran Kegiatan	1 Deviasi Persentase Harga Minyak Mentah Indonesia (ICPI) (%)		5	5	5	5	5								DMBP
Sasaran Kegiatan	Optimalnya Tingkat Komponen Dalam Negeri pada Kegiatan Hulu Migas														

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	1 Persentase Tingkat Komponen Dalam negeri (TKDN) dalam Kegiatan Usaha Hulu Migas (%)		60	61	62	63	64							DMBS, DMBI, DMBD
Kegiatan 2	Pembinaan dan Penyelenggaraan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi													
Sasaran Kegiatan	Tersedianya Pasokan Hulu Migas Sesuai Kebutuhan													
Indikator Sasaran Kegiatan	1 Indeks Ketersediaan Hulu Migas (Indeks Skala ≥ 1)		1	1	1	1	1							DMEP, DMEN
	- Produksi Minyak Bumi (MBOPI)		755	716	727	743	743							
	- Produksi Gas Bumi (MBOEPI)		1.191	1.261	1.281	1.286	1.306							
	- Persentase Pemanfaatan Gas Bumi Domestik (%)		64	65	66	67	68							
	- Persentase Deviasi Kuantitas Ekspor Minyak Mentah dari Kuantitas yang Direkomendasikan (%)		15	15	15	15	15							
	- Persentase Deviasi Kuantitas Ekspor LNG skema hulu dari kuantitas yang direkomendasikan (%)		15	14	13	12	10							
Sasaran Kegiatan	Terjaminnya Pasokan Hulu Migas yang Berkelanjutan													

Program / Kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana		
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024			
Indikator Sasaran Kegiatan	1	Reserve to Production Ratio Minyak/Gas Bumi (tahun)		8,01/19,10	7,41/17,14	6,31/15,89	5,20/14,83	4,18/13,58							DMEW, DMEN, DMEE, DMED, DMEP	
		- Persentase WK Migas Konvensional yang diminati terhadap Jumlah WK Migas Konvensional yang ditawarkan (%)		60	60	60	60	60								
		Persentase WK Migas Non-Konvensional Yang Diminati Terhadap Jumlah WK Migas Non-Konvensional yang Ditawarkan (%)		50	50	50	50	50								
		- Jumlah Sumber Daya Migas Pada Masa Eksplorasi (BBOE)		70	70,35	70,70	71,06	71,41								
		- Jumlah Rekomendasi POD 1 yang disetujui oleh Dirjen		2	2	2	3	2								
		- Jumlah Evaluasi Persetujuan Pengalihan Participating Interest 10%		2	2	2	2	2								
		- Jumlah WK yang kontraknya diperpanjang/alih kebela		2	2	2	2	2								
		- Jumlah Cadangan Minyak Bumi (MMSTB)		2.212,08	1.935,75	1.674,41	1.409,05	1.137,86								

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
Sasaran Kegiatan	- Jumlah Cadangan Gas Bumi (TCF)		47,10	44,63	42,03	39,38	36,73							
	Meningkatnya Akurasi Formulasi Harga Gas dan LNG Skema Hulu													
	1 Persentase Deviasi Harga Gas Skema Hulu (Gas Pipa, LNG, LPG dan Gas Saar) (%)		0	0	0	0	0							
Kegiatan 3	Pembinaan dan Penyelenggaraan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi													
Sasaran Kegiatan	Tersedianya Pasokan Hilir Migas Sesuai Kebutuhan													DMOH, DMON, DMOS
Indikator Sasaran Kegiatan	1 Indeks Ketersediaan BBM (Indeks Skala ≥ 1)		1	1	1	1	1							
	- Produksi BBM dan Hasil Olahahan (BOPD)		767.680	767.680	767.680	824.680	990.680							
Indikator Sasaran Kegiatan	- Persentase Deviasi Kuantitas Impor Minyak Mentah untuk Feedstock Kilang dari Kuantitas yang Direkomendasikan (%)		30	27	25	20	15							
	- Persentase Deviasi Kuantitas Impor BBM dari Kuantitas yang Direkomendasikan (%)		30	27	25	20	15							
	- Persentase Deviasi Kuantitas Ekspor BBM dari Kuantitas yang Direkomendasikan (%)		30	27	25	20	15							

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana		
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024			
2	Indeks Ketersediaan LPG (Indeks Skala ≥ 1)		1	1	1	1	1								
	- Produksi LPG (Juta Ton)		1,97	1,97	1,97	1,97	1,97								
	- Persentase Deviasi kuantitas Impor LPG dari kuantitas yang direkomendasikan (%)		20	17	15	12	10								
	- Persentase Deviasi kuantitas ekspor LPG dari kuantitas yang direkomendasikan (%)		30	27	25	22	20								
3	Penyediaan Epilji 3 kg bagi Masyarakat, Usaha Mikro, Nelayan, dan Petani Sasaran (Ribu Ton)		7000	7364-7399	7754-7836	8165-8431	8614-8870								
4	Persentase Realisasi Volume LPG Bersubsidi terhadap Kuota Yang Ditetapkan (%)		100	100	100	100	100								
	Indeks Ketersediaan LNG (Indeks Skala ≥ 1)		1	1	1	1	1								
	- Produksi LNG (Juta Ton)		17,05	17,05	17,05	17,05	17,05								
	- Persentase Deviasi Kuantitas Ekspor LNG Skema Hilir (Trading) dari Kuantitas yang Direkomendasikan (%)		15	14	13	12	10								
5	Jumlah Hari Cadangan BBM Operasional (hari)		23	23	23	23	23								
6	Jumlah Hari Cadangan LPG Operasional (hari)		14	14	14	14	14								

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target				Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana		
			2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023		2024	
Sasaran Kegiatan	Meningkatnya Akurasi Formulasi Harga Migas Hilir												DMOH, DMON, DMOS
Indikator Sasaran Kegiatan	1. Meningkatnya Akurasi Formulasi Harga Migas Hilir												
	- Persentase Deviasi Harga Jual Eceran BBM dan LPG (%)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- Persentase Deviasi Harga Gas Hilir (%)		30	28	26	24	22	22	22	22	22	22	
Sasaran Kegiatan	Tersedianya fasilitas Niaga, Pengangkutan, Pengolahan dan Penyimpanan sesuai kebutuhan												DMOH, DMON, DMOS
Indikator Sasaran Kegiatan	1. Indeks Aksesibilitas Migas		74	75	87	85	91	91	91	91	91	91	
	A. Indeks Fasilitas Niaga Migas (Indeks Skala 100)		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
	- Kapasitas Fasilitas Penyimpanan Niaga LPG (ton)		397	401	405	409	413	413	413	413	413	413	
	- Kapasitas Fasilitas Filling Station Niaga LPG (ton/d)		804	820	820	837	837	837	837	837	837	837	
	- Kapasitas Fasilitas Filling Station Niaga LNG (MMSCFD)		35	40	45	45	45	45	45	45	45	45	
	- Kapasitas Fasilitas Mother Station Niaga CNG (MMSCFD)		119	121	125	128	130	130	130	130	130	130	

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target				Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana	
			2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023		2024
	- Kapasitas Fasilitas Niaga Gas Bumi (Km)		6497	6516	6536	6555	6575					
	- Kapasitas Fasilitas Niaga Minyak Bumi, BBM dan Hasil Olahahan (KL)		764.347	779.634	795.227	811.131	827.354					
	B. Indeks Fasilitas Pengangkutan Migas (Indeks Skala 100)		100	100	100	100	100					
	- Kapasitas Fasilitas Pengangkutan Minyak Bumi, BBM dan Hasil Olahahan (KL)		500	500	500	500	500					
	- Kapasitas Fasilitas Pengangkutan LPG (ton)		100	100	100	100	100					
	- Kapasitas Fasilitas Pengangkutan CNG (m3)		50	50	50	50	50					
	- Kapasitas Fasilitas Pengangkutan LNG (m3)		50	50	50	50	50					
	- Kapasitas Fasilitas Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa (MMSCFD)		100	100	100	100	100					
	C. Indeks Fasilitas Pengolahan Migas (Indeks Skala 100)		60	59	59	59	62					
	- Kapasitas Terpasang Kilang BBM (ribu BCPD)		1.151	1.151	1.176	1.276	1.276					
	- Kapasitas Terpasang Kilang Gas Bumi LNG (Juta Ton)		31,24	31,24	31,24	31,24	31,24					

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	- Kapasitas Terpasang Kilang Gas Bumi LPG (Juta Ton)		3,88	3,88	3,88	3,88	3,88							
	D. Indeks Fasilitas Penyimpanan Migas (Indeks Skala 100)		100	100	100	100	100							
	- Kapasitas Fasilitas Penyimpanan Minyak Bumi, BBM dan Hasil Olahahan (KL)		7.039.678	7.045.678	7.052.678	7.060.678	7.070.678							
	- Kapasitas Fasilitas Penyimpanan LNG (m3)		835.626	850.626	850.626	850.626	850.626							
	- Kapasitas Fasilitas Penyimpanan LPG (ton)		522.457	523.057	523.757	524.557	525.557							
	- Kapasitas Fasilitas Penyimpanan CNG (m3)		1.005.780	1.005.780	1.005.780	1.005.780	1.005.780							

E. Fasilitas Peningkatan Infrastruktur Kilang Minyak Bumi (Tahapan)	<p>Regulasi dan Perizinan: - Keputusan Menteri ESDM Nomor 100K/10/ME/M/2020 tentang Penugasan kepada PT Pertamina (Persero) dalam Pengembangan dan Pengerasian Kilang Minyak di Balongan, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat; - Keputusan Menteri ESDM Nomor 99K/10/ME/M/2020 tentang Penugasan kepada PT Pertamina (Persero) dalam Pengembangan dan Pengerasian Kilang Minyak di Plaju, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan; - Keputusan Menteri ESDM Nomor</p>	Monitoring, Evaluasi dan Dukungan Regulasi Pembangunan dan Pengembangan Kilang	Monitoring, Evaluasi dan Dukungan Regulasi Pembangunan dan Pengembangan Kilang	Monitoring, Evaluasi dan Dukungan Regulasi Pembangunan dan Pengembangan Kilang		
---	--	--	--	--	--	--

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
		98K/10/ME M/2020 tentang Penugasan kepada PT Pertamina (Persero) dalam Pengeimbangan dan Pengoperasian Kilang Minyak di Dumai, Provinsi Riau ; - Ijin Usaha Semenitra Pengalihan PT. Kilang Pertamina Balikpapan (KPLB), nomor 27/A.8/MEK AS/2020 tanggal 3 Juni 2020; -Penyesuaian perizinan untuk kilang GRR dan RDMP												
Kegiatan 4	Perencanaan, Pengadaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi													
Sasaran Kegiatan	Tersedianya Paket Konversi Minyak Tanah ke LPG Tabung 3 kg untuk daerah yang belum terkonversi													DMIR, DMIB

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
Indikator Sasaran Kegiatan	1 Penyediaan Paket Konversi Minyak Tanah ke LPG Tabung 3 Kg (Paket)		-	-	1.106.905	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Persentase Kesesuaian Perencanaan Konversi Mitan ke LPG 3 kg terhadap Roadmap (%)		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
	- Persentase Realisasi Jumlah dan Kesesuaian Wilayah Penerima Paket Konversi Mitan ke LPG 3 KG (%)		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	DMIR, DMIB
Sasaran Kegiatan	Tersedianya Paket Konverter Kit BBM ke BBG untuk Nelayan													
Indikator Sasaran Kegiatan	1 Penyediaan Konverter Kit BBM ke Bahan Bakar Gas untuk Nelayan (Paket)		-	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
	- Persentase Kesesuaian Perencanaan Jumlah dan Kesesuaian Wilayah Penerima Konkit BBM ke BBG terhadap Roadmap untuk Nelayan (%)		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
	- Persentase Realisasi Jumlah dan Kesesuaian Wilayah Penerima Konverter Kit BBM ke BBG terhadap Roadmap untuk Nelayan (%)		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	DMIR, DMIB
Sasaran Kegiatan	Tersedianya Paket Konverter Kit BBM ke BBG untuk Petani													

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
Indikator Sasaran Kegiatan	1 Penyediaan Konverter Kit BBM ke Bahan Bakar Gas untuk Petani (Paket)		-	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000						
	- Persentase Kesesuaian Perencanaan Jumlah dan Kesesuaian Wilayah Penerima Konkit BBM ke BBG terhadap Roadmap untuk Petani(%)		100	100	100	100	100							
Sasaran Kegiatan	- Persentase Realisasi Jumlah dan Kesesuaian Wilayah Penerima Konverter Kit BBM ke BBG terhadap Roadmap untuk Petani(%)		100	100	100	100	100							
	Tersedianya Infrastruktur Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga sesuai dengan Roadmap													DMIR, DMIB
Indikator Sasaran Kegiatan	1 Infrastruktur Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga (APBN) (SR)		127.864	138.206	100.000	-	-							
	- Infrastruktural Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga (KPBL) (SR)		-	50.000	839.555	800.000	800.000							
	- Persentase Kesesuaian Dokumen FEED / DEEDC, UKL/UPL terhadap Roadmap Jaringan Gas (%)		100	100	100	100	100							

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana		
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024			
	- Persentase Pengadaan Jaringan Gas yang Berhasil terhadap Total Pengadaan Jaringan Gas yang Dilakukan (%)		100	100	100	100	100								
	- Persentase Kesesuaian Jumlah dan Kualitas Jaringan Gas yang Dibangun terhadap Dokumen Pelelangan Pembangunan (%)		100	100	100	100	100								
	- Persentase Realisasi Pembangunan Jaringan Rumah Tangga terhadap Dokumen Pengadaan (Kontrak) (%)		100	100	100	100	100								
	- Persentase Utilisasi Jaringan Rumah Tangga pada Tahun Berjalan (%)		100	100	100	100	100								
Sasaran Kegiatan	Terlaksananya Studi Pendahuluan Pembangunan Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga melalui Skema KPBU														DMIR, DMIB
Indikator Sasaran Kegiatan	1 Studi Pendahuluan Pembangunan Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga melalui Skema KPBU (Lokasi)		8	10	8	8	8								
Sasaran Program 2	Optimalisasi Kontribusi Subsektor Migas yang Bertanggungjawab dan Berkelanjutan														DMB
Indikator Sasaran Program	1 Persentase Realisasi Investasi Subsektor Migas (%)		75	77	79	81	83								

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	2 Persentase Realisasi PNPB Subsektor Migas (%)		85	87	89	91	93							
Kegiatan	Penyusunan Kebijakan dan Optimalisasi Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi													
Sasaran Kegiatan	Optimalnya Kontribusi Subsektor Migas untuk memberi nilai tambah dan efek penganda bagi perekonomian nasional													
Indikator Sasaran Kegiatan	1 Persentase Realisasi Investasi Subsektor Migas (%)		75	77	79	81	83							DMBI
	2 Persentase Realisasi Penanaman Negara Migas (%)		85	87	89	91	93							DMBP
Sasaran Program 3	Layanan Subsektor Migas yang Optimal													DME, DMO, DMT, DMB, SDM
Indikator Sasaran Program	Indeks Kepuasan Layanan Subsektor Migas (Indeks Skala 4)		3	3,25	3,30	3,35	3,40							
Kegiatan 1	Penyusunan Kebijakan dan Optimalisasi Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi													
Sasaran Kegiatan	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dan Pelaku Usaha terhadap Layanan Informasi Migas													SDML, SDMH

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
Indikator sasaran Kegiatan	1 Indeks Kepuasan Layanan Informasi Migas (Indeks Skala 4)		3	3,25	3,30	3,35	3,40							
Kegiatan 2	Penyiapan Kebijakan dan Optimalisasi Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi													
Sasaran Kegiatan	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dan Pelaku Usaha terhadap Layanan Program Migas													SDML, SDMH
Indikator sasaran Kegiatan	1 Indeks Kepuasan Layanan Program Migas (Indeks Skala 4)		3	3,25	3,30	3,35	3,40							
Kegiatan 3	Penyiapan Kebijakan dan Optimalisasi Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi													
Sasaran Kegiatan	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dan Pelaku Usaha terhadap Layanan Hulu Migas													SDML, SDMH
Indikator sasaran Kegiatan	1 Indeks Kepuasan Layanan Hulu Migas (Indeks Skala 4)		3	3,25	3,30	3,35	3,40							
Kegiatan 4	Penyiapan Kebijakan dan Optimalisasi Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi													
Sasaran Kegiatan	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dan Pelaku Usaha terhadap Layanan Hilir Migas													SDML, SDMH

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
Indikator sasaran Kegiatan	1 Indeks Kepuasan Layanan Hilir Migas (Indeks Skala 4)		3	3,25	3,30	3,35	3,40							
Kegiatan 5	Penyusunan Kebijakan dan Optimalisasi Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi													
Sasaran Kegiatan	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dan Pelaku Usaha terhadap Layanan Keselamatan Teknik dan Lingkungan Migas													SDML, SDMH
Indikator sasaran Kegiatan	1 Indeks Kepuasan Layanan Keselamatan Teknik dan Lingkungan Migas (Skala 4)		3	3,25	3,30	3,35	3,40							
Sasaran Program 4	Pembinaan, Pengawasan, dan Penguadalan Sektor ESDM yang Efektif													DME, DMO, DMT, DMB, SDM
Indikator Sasaran Program	Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Subsektor Migas (Indeks Skala 100)		75,50	76,50	77,50	78,50	79,50							
Kegiatan 1	Penyusunan Kebijakan dan Optimalisasi Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi													
Sasaran Kegiatan	Meningkatnya Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Program Migas													
Indikator Sasaran Kegiatan	Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Program Migas (Indeks skala 100)		75,50	76,50	77,50	78,50	79,50							DMBK, DMBD

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana		
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024			
Kegiatan 2	Pembinaan dan Penyelenggaraan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi														
Sasaran Kegiatan	Meningkatnya Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Hulu Migas														DMEW, DMEN, DMEE, DMED, DMEP
Indikator Sasaran Kegiatan	Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Hulu Migas (Indeks skala 100)		75,50	76,50	77,50	78,50	79,50								
Kegiatan 3	Pembinaan dan Penyelenggaraan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi														
Sasaran Kegiatan	Meningkatnya Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Hilir Migas														DMOA, DMOS, DMOO, DMON, DMOH
Indikator Sasaran Kegiatan	Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Hilir Migas (Indeks skala 100)		75,50	76,50	77,50	78,50	79,50								
Kegiatan 4	Pembinaan Lindungan Lingkungan, Keselamatan Operasi dan Usaha Penunjang Bidang Migas														
Sasaran Kegiatan	Meningkatnya Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Keselamatan Migas														DMTO, DMTE, DMTS, DMTL, DMTP

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
Indikator Sasaran Kegiatan	Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Keselamatan Teknik dan Lingkungan Migas (Indeks Skala 100)		75,5	76,5	77,5	78,5	79,5							
Sasaran Program 5	Terwujudnya Kegiatan Operasi Migas yang Aman, Andal, dan Ramah Lingkungan													DMT
Indikator Sasaran Program	Indeks Keselamatan Migas (Indeks Skala 100)		88	88	90	90	91							
1	Persentase Perusahaan yang telah menerapkan standar wajib untuk kegiatan usaha migas terhadap Total Perusahaan Hulu dan Hilir Migas (%)		10	20	30	40	50							
2	Jumlah RSNI & RSKNI pada kegiatan usaha migas		6	7	8	9	10							
3	Persentase Perusahaan yang telah Menerapkan Kaidah Keteknikan dan Pencegahan Lingkungan yang Baik terhadap Total Perusahaan Hulu dan Hilir Migas (%)		2,73	3,52	4,27	4,98	5,65							
4	Frekuensi Kejadian Keelakaan Kerja yang Menyebabkan Fatality Pada Kegiatan Usaha Hulu Migas		5	5	4	4	4							

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
5	Frekuensi Unplanned Shutdown pada Kegiatan Usaha Hulu Migas		35	35	33	33	25							
6	Kontraktor atau Perusahaan Hulu Migas yang memiliki SMKM dengan Kategori Baik (>76,55%)		4	6	8	10	12							
7	Frekuensi Kejadian Kecelakaan Kerja yang Menyebabkan Fatality Pada Kegiatan Usaha Hilir Migas		10	10	9	9	8							
8	Frekuensi Unplanned Shutdown pada Kegiatan Usaha Hilir Migas		10	10	9	9	8							
9	Perusahaan Hilir Migas yang Memiliki SMKM dengan Kategori Baik (>76,55%)		12	14	16	18	20							
10	Persentase Perusahaan Pemegang Migas yang Dianudit Kepatuhan Aspek Keselamatan terhadap total Perusahaan Pemegang Migas (%)		4	5	6	7	8							
11	Jumlah objek vital migas nasional yang diawasi		35	40	45	50	55							
Kegiatan	Pembinaan, Lindungan, Ujungan, Keselamatan Operasi dan Usaha Pemungutan Bidang Migas													

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024					
Sasaran Kegiatan	Terwujudnya kegiatan operasi migas yang aman, andal, dan ramah lingkungan																
Indikator Sasaran Kegiatan	Indeks Keselamatan Migas (Skala 100)		88	88	90	90	91										
	1 Persentase Perusahaan yang telah menerapkan standar wajib untuk kegiatan usaha migas terhadap Total Perusahaan Hulu dan Hilir Migas (%)		10	20	30	40	50										
	2 Jumlah RSN1 & RSKINI pada kegiatan usaha migas		6	7	8	9	10										
	3 Persentase Perusahaan yang telah Menerapkan Kaidah Keteknikan dan Pengelolaan Lingkungan yang Baik terhadap Total Perusahaan Hulu dan Hilir Migas (%)		2,73	3,52	4,27	4,98	5,65										
	4 Frekuensi Kejadian Kecelakaan Kerja yang Menyebabkan Fatality Pada Kegiatan Usaha Hulu Migas		5	5	4	4	4										
	5 Frekuensi Unplanned Shutdown pada Kegiatan Usaha Hulu Migas		35	35	33	33	25										

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	6 Kontraktor atau Perusahaan Hulu Migas yang memiliki SMK dengan Kategori Baik (>76,55 %)		4	6	8	10	12						
	7 Frekuensi Kejadian Kecelakaan Kerja yang Menyebabkan Fatality Pada Kegiatan Usaha Hilir Migas		10	10	9	9	8						
	8 Frekuensi Unplanned Shutdown pada Kegiatan Usaha Hilir Migas		10	10	9	9	8						
	9 Perusahaan Hilir Migas yang Memiliki SMK dengan Kategori Baik (>76,55%)		12	14	16	18	20						
	10 Persentase Perusahaan Pemunjang Migas yang Dianudit, Keputuhan Aspek Keselamatan terhadap total Perusahaan Pemunjang Migas (%)		4	5	6	7	8						
	11 Jumlah objek vital migas nasional yang diawasi		35	40	45	50	55						
BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI													
Sasaran Program 1	Tersedianya BBM di seluruh wilayah NKRI dan peningkatan pemanfaatan gas bumi dalam negeri												
			249,70	271,17	250,64	251,86	253,13						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
Indikator Program	1		253	329	401	457	500							
			83	76	72	56	43							
	2		15.300	15.800	16.300	16.800	17.300							
Kegiatan 1	Pengaturan, Penetapan dan Pelaksanaan Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian Bbm													
Sasaran Kegiatan	Tersedianya Bbm di seluruh wilayah NKRI													
Indikator Sasaran Kegiatan	Penambahan penyuluh Bbm Satu barga di wilayah 3T		83	76	72	56	43							
Kegiatan 2	Pengaturan, Penetapan dan Pelaksanaan pada Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa													
Sasaran Kegiatan	Terwujudnya peningkatan pemanfaatan gas bumi dalam negeri dan ketersediaan infrastruktur gas bumi melalui pipa melalui pengaturan dan peneetapan dan pelaksanaan perawatannya													

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
Indikator Sasaran Kegiatan	1 Jumlah Layanan Dukungan Percepatan Pembangunan dan Rekomendasi Hasil Pengawasan Pembangunan Ruas Kaltim-Kalsel dan WJD di Kalimantan (Rekomendasi)		1	1	1	1	1	1						
	2 Percepatan Pembangunan Pipa Gas Bumi Trans Kalimantan (Tahapan)		Evaluasi Kelayakan dan Persiapan Pembangunan	Regulasi dan Perizinan/ Peta Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional (RJ/TDGBN)	Lelang Proyek dan Dukungan Pelaksanaan Konstruksi	Pelaksanaan Konstruksi								Pengawasan
Sasaran Program 2	Terlaksananya pengawasan, penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan perangkutan gas bumi melalui pipa													
Indikator Program	1 Persentase pengalihan Jenis BBM tertentu (JBT) dan Jenis BBM Khusus Pengawasan (JBKP) yang ditugaskan kepada Badan Usaha (%)		100	100	100	100	100	100						
	2 Volume Pengangkutan dan Niaga Gas Bumi Melalui Pipa (MMSCF)		1.515.803.765	1.591.594.000	1.671.174.000	1.754.732.000	1.842.468.000							
Kegiatan 1	Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian Bbm													

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana		
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024			
Sasaran Kegiatan	Terlaksananya pengawasan, penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak														
Indikator Sasaran Kegiatan	1 Persentase pemaluan Jenis BBM tertentu (JBT) dan Jenis BBM Khusus Pemugasan (JBKP) yang ditugaskan kepada Badan Usaha (%)		100	100	100	100	100	100	100	100					
	2 Persentase pelaksanaan pengawasan penyalur BBM satu Harga di wilayah 3 T (%)		100	100	100	100	100	100	100	100					
	3 Jumlah rekomendasi hasil pengawasan atas penyediaan dan pendistribusian BBM (rekomendasi)		4	4	4	4	4	4	4	4					
Kegiatan 2	Pengawasan pada Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa														
Sasaran Kegiatan	Terlaksananya pengawasan penanganan gas bumi melalui pipa														
Indikator Sasaran Kegiatan	1 Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Pipa Transmisi dan Distribusi Melalui Pipa (Rekomendasi)		1	1	1	1	1	1	1	1					

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target				Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana		
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023		2024	
Sasaran Program 3	Tersedianya Pengaturan dan Penetapan terhadap Penyediaan dan Pendistribusian BBM dan Pemasngkutan Gas Bumi Melalui Pipa													
Indikator Program	Jumlah produk hukum BPH Migas (SK)		140	140	140	140	140							
Kegiatan 1	Pengaturan, Pene-tapan dan Pelaksanaan Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian Bbm													
Sasaran Kegiatan	Tersedianya pengaturan dan penetapan penyediaan dan pendistribusian BBM di seluruh wilayah NKRI													
Indikator Sasaran Kegiatan	1 Jumlah draf peraturan juklak)uknis SOP bidang penyediaan dan pendistribusian BBM (Draf Peraturan)		1	1	1	1	1							
	2 Jumlah SK perencanaan pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian BBM (SK)		26	26	26	26	26							
Kegiatan 2	Pengaturan, Pene-tapan dan Pengawasan pada Kegiatan Usaha Pemasngkutan Gas Bumi Melalui Pipa													
Sasaran Kegiatan	Tersedianya Pengaturan dan Penetapan terhadap Penyediaan dan Pemasngkutan Gas Bumi Melalui Pipa													

Program / Kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target						Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah)						Unit Organisasi Pelaksana		
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024					
1	Jumlah SIK pengaturan penetapan, monitoring dan evaluasi baik khusus pengangkutan dan niaga gas bumi melalui pipa (SK)	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6				
2	Jumlah Penetapan Lelang WJD Eksisting (SK)	0	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6				
3	Jumlah SIK pengaturan penetapan dan pengawasan pemantauan bersama fasilitas pengangkutan gas bumi melalui pipa (SK)	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2				
4	Jumlah Penetapan Wilayah Jaringan Distribusi Gas Bumi Baru di Kalimantan yang dlehang (SK)	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
5	Jumlah SIK Penetapan Tarif Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (SK)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2				
6	Jumlah penetapan Harga Gas Bumi Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil (SK)	4	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6				
BADAN PENGELOLA MIGAS ACEH													77,79	69,10	130,59	143,68	161,48	
Sasaran Program 1	Meningkatnya kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional																	

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
Indikator Sasaran Program	1	Persentase Reserves Replacement Ratio untuk Minyak dan Gas Bumi Wilayah Kewenangan Aceh (%)	52	10	10	52	52							
	2	Produksi Minyak & Gas Bumi (BOEPD)	15.189,7	18.483,4	23.456,7	21.961,0	24.426,9							
	3	Optimasi Lifting Cost Produksi Minyak & Gas Bumi (US\$/boe)	13,69	10	13	12	14							
	4	Komitmen TKDN Pada Industri Hulu Migas (%)	55	55	55	55	55							
Kegiatan 1	Perencanaan													
Sasaran Kegiatan 1	Meningkatkan Resources dan Reserves Minyak dan Gas Bumi													
Indikator Sasaran Kegiatan	1	Pemberian Dukungan Kepada Pemerintah dalam Penyusunan dan Kajian Wilayah Kerja (rekomendasi)	1	1	2	2	2							
	2	Survei Seismik dan Processing (kegiatan)	-	1	1	1	1							
	3	Pemboran Eksplorasi (sumur)	-	1	2	2	2							
	4	Pemboran Eksploitasi (sumur)	-	1	1	6	2							
	5	Pemenuhan Komitmen Pasti dan Komitmen Kerja (Kegiatan)	-	2	2	2	2							

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana		
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024			
Sasaran Kegiatan 2	Optimasi Perencanaan Kegiatan Hulu Migas aspek teknis dan keekonomian														
Indikator Sasaran Kegiatan	1 Rekomendasi Rencana Program dan Anggaran Serta Pengawasan Kegiatan Eksplorasi Migas (Rekomendasi)		2	1	3	4	4								
	2 Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran (WP&B) Eksplorasi (Dokumen)		2	1	3	4	4								
	3 Laporan Perkiraan Cadangan & Produksi Minyak dan Gas Bumi Wilayah Aceh (Laporan)		1	1	1	1	1								
Sasaran Kegiatan 3	Meningkatnya kemandirian dan ketahanan Energi Nasional														
Indikator Sasaran Kegiatan	1 Rekomendasi Rencana Program dan Anggaran serta Pengawasan Kegiatan Eksplorasi Migas (Rekomendasi)		4	4	5	5	5								
	2 Pengendalian POD (Dokumen)		3	3	4	4	4								
	3 Rekomendasi Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran (WP&B) Eksplorasi (Rekomendasi)		4	4	5	5	5								
	4 Persetujuan dan atau rekomendasi Otorisasi Pengeluaran Biaya (APE)		8	8	8	8	8								

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target				Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana									
			2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023		2024								
Kegiatan 2	Operasi																			
Sasaran Kegiatan	Memastikan operasi produksi berjalan dengan baik untuk mencapai target produksi dan lifting																			
Indikator Sasaran Kegiatan	1. Tercapainya Lifting sesuai Target WP&B (BOEPP)		8.145	11.632	14.762	13.820	15.372													
	2. Realisasi kegiatan Operasi Produksi sesuai dengan WP&B (Kegiatan)		3	3	3	3	3													
Kegiatan 3	Keuangan Komersial																			
Sasaran Kegiatan	Menjamin lindungan lingkungan pasca operasi																			
Indikator Sasaran Kegiatan	Komitmen Pencampuran Dana ASR di Bank BUMM (Juta US\$)		1,5	3,2	3,2	3,2	3,2													
Kegiatan 4	Dukungan Bisnis																			
Sasaran Kegiatan	Meningkatnya Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional																			
Indikator Sasaran Kegiatan	1. Persentase Unscheduled Downtime Aplikasi Sistem Informasi Dalam Kondisi Normal (%)		2	2	2	2	2													
	2. Persentase Penyelesaian Service Level Agreement (SLA) Help Desk (%)		94	96	96	97	98													

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	3 Pengembangan <i>Big Data Machine Learning</i>		-	-	2	2	3							
Sasaran Kegiatan	Terlaksananya Manajemen Formalitas dan Hubungan Eksternal													
Indikator Sasaran Kegiatan	1 Dukungan kegiatan Eksplorasi KKKS di wilayah kewenangan Aceh (Laporan)		1	1	1	1	1							
	2 Dukungan kegiatan Eksplorasi KKKS di wilayah kewenangan Aceh (Laporan)		1	1	1	1	1							
Kegiatan 5	Manajemen Internal													
Sasaran Kegiatan	Mendorong Efektivitas Manajemen Regulasi dan Pemenuhan Pelaksanaan PP 23 Tahun 2015													
Indikator Sasaran Kegiatan	1 Jumlah rekomendasi aspek hukum KKS (Rekomendasi)		2	2	2	1	1	1						
	2 Jumlah rekomendasi aspek sumber daya manusia KKKS (berdasarkan realisasi peserta pelatihan dari rencana pelatihan) (Rekomendasi)		1	3	1	1	1	1						
Sasaran Program 2	Optimalisasi Kontribusi Sektor Migas Wilayah Kewenangan Aceh yang Bertanggung Jawab dan Berkelanjutan													

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
Indikator Sasaran Program	Penerimaan Negara dari Subsektor Migas di Wilayah Kewenangan Aceh (Juta US\$)		34,81	41,43	52,58	49,22	54,75						
Kegiatan 1	Perencanaan												
Sasaran Kegiatan	Optimalisasi Kontribusi Sektor Migas Wilayah Kewenangan Aceh yang Bertanggung Jawab dan Berkelanjutan												
Indikator Sasaran Kegiatan	Rekomendasi Perkiraan penerimaan negara minyak dan gas bumi		1	1	1	1	1						
Kegiatan 2	Operasi												
Sasaran Kegiatan 1	Optimalisasi Kontribusi Sektor Migas Wilayah Kewenangan Aceh yang Bertanggung Jawab dan Berkelanjutan												
Indikator Sasaran Kegiatan	1. Persentase Pengawasan terhadap Anggaran Kegiatan Pemunjang Operasi KKKS sesuai dengan persetujuan WP&B (%)		90	90	90	90	90						
	2. Persentase Optimalisasi penggunaan anggaran aktifitas pemunjang operasi KKKS sesuai dengan persetujuan dalam WP&B (%)		90	90	90	90	90						

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target				Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana							
			2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023		2024						
Sasaran Kegiatan 2	Peningkatan dan Penguasaan Ketersediaan, integrasi dan keandalan fasilitas produksi yang optimal																	
Indikator Sasaran Kegiatan	Jumlah Rekomendasi Penyelesaian Tahapan Penyelesaian Pekerjaan (PPP) dan Penyelesaian <i>Force Into Service</i> (PIS) Fasilitas Produksi (Rekomendasi)		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Kegiatan 3	Keuangan Komersial																	
Sasaran Kegiatan	Optimalisasi Kontribusi Keuangan Sektor Migas Wilayah Kewenangan Aceh yang Bertanggung Jawab dan Berkelanjutan																	
Indikator Sasaran Kegiatan	1. Penghasilan Pemerintahan Negara dari Subsektor Migas di Wilayah Kewenangan Aceh (Juta US\$)		34,81	41,43	52,58	49,22	54,75											
	2. Rekomendasi Legalitas Komersialisasi Minyak dan/atau Gas Bumi (Rekomendasi)		2	2	2	2	2											
	3. Terlaksananya Pemertasaan Biaya dan Perhitungan Bagian Negara (Laporan)		1	7	3	3	6											
Kegiatan 4	Dukungan Bisnis																	

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana		
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024			
Sasaran Kegiatan	Optimalisasi Pengadaan dan Penggunaan Aset Bersama Sektor Migas Wilayah Kewenangan Aceh yang Bertanggung Jawab dan Berkelanjutan														
Indikator Sasaran Kegiatan	1 Penghematan dari Proses Pengadaan (US\$)		500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000					
	2 Penghematan dari Optimalisasi Aset Bersama (Rekomendasi)		10	10	10	10	10	10	10	10					
Sasaran Program 3	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian BPMA yang Efektif														
Indikator Sasaran Program	Incident Rate Kecelakaan Kerja Kegiatan Hulu Migas		1	1	1	1	1	1	1	1					
Kegiatan 1	Operasi														
Sasaran Kegiatan 1	Pengendalian dan Pengawasan program Kesehatan, Keselamatan Kerja yang Optimal														
Indikator Sasaran Kegiatan	1 Mengkolaborasi semua stakeholder kegiatan pemantauan operasi melalui program kontrak atau penggunaan fasilitas bersama (FSA/ Kontrak)		2	2	2	2	2	2	2	2					
	2 Plant Availability fasilitas produksi (%)		85	85	85	85	85	85	85	85					

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana			
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024				
Sasaran Kegiatan 2	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Sektor ESDM yang Efektif															
Indikator Sasaran Kegiatan	1 Incident Rate Kecelakaan Kerja Kegiatan Huhu Migas (Praksis)		1	1	1	1	1	1								
	2 Komitmen Ketataan KKS dalam PROPER (Birn) dari Total Jumlah Peserta Kontraktor KKS		2	2	2	2	2	2								
Kegiatan 2	Manajemen Internal															
Sasaran Kegiatan	Pengawasan, Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi BPMA yang Efektif															
Indikator Sasaran Kegiatan	Nilai SAKIP BPMA (Skala 100)		80	82	83	85	85	85								
Sasaran Program 4	Tersedianya Perencanaan yang Berkualitas															
Indikator Sasaran Program	Indeks Kualitas Perencanaan BPMA (Skala 100)		80	82	83	85	85	85								
Kegiatan	Manajemen Internal															
Sasaran Kegiatan	Tersedianya Perencanaan yang Berkualitas															
Indikator Sasaran Kegiatan	Indeks Kualitas Perencanaan BPMA (Skala 100)		80	82	83	85	85	85								

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana		
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024			
Sasaran Program 5	Organisasi yang Fit dan SDM yang Unggul														
Indikator Sasaran Program	1 Persentase pekerja BPMA yang memenuhi Kualifikasi sesuai posisi jabatan (%)		90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	
	2 Persentase tingkat kedisiplinan terhadap pekerja BPMA berdasarkan data absensi pegawai (%)		90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	
Kegiatan	Manajemen Internal														
Sasaran Kegiatan	Organisasi yang Fit dan SDM yang Unggul														
Indikator Sasaran Kegiatan	1 Persentase pekerja BPMA yang mengikuti pelatihan/ sertifikasi berdasarkan rencana program kerja pelatihan dan sertifikasi (%)		90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	
	2 Persentase tingkat kedisiplinan terhadap pekerja BPMA berdasarkan data absensi pegawai (%)		90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	
	3 Jumlah Maksimal Kejadian Berhentiya Operasi Karena Permasalahan Hubungan Industrial (Kejadian)		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
	4 Persentase Realisasi Pengembangan SDM (%)		90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana		
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024			
	5 Persentase Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan (%)		85	85	85	85	85								
Sasaran Program 6	Pengelolaan Sistem Anggaran yang Optimal														
Indikator Sasaran Program	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BPMA (Skala 100)		90,0	90,3	90,5	90,8	91,0								
Kegiatan	Manajemen Internal														
Sasaran Kegiatan	Pengelolaan Sistem Anggaran BPMA yang Optimal														
Indikator Sasaran Kegiatan	1 Nilai IKPA (Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran) BPMA (Skala 100)		90,0	90,3	90,5	90,8	91,0								
	2 Pengelolaan Sistem Anggaran BPMA yang Optimal (%)		96	96	96	96	96								
	3 Jumlah dokumen perencanaan (struktur kinerja, RKA, KAK, RAB, DIPA dan RKA-KL) (Dokumen)		6	6	6	6	6								
	4 Jumlah Laporan BPMA (Laporan)		4	4	4	4	4								
DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN			125,58	174,98	273,18	294,52	320,08								
Sasaran Program 1	Meningkatkan Kemandirian dan Ketahanan Ketenagalistrikan Nasional	Pusat													

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target				Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana	
			2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023		2024
Indikator Program	1 Indeks Kemandirian Ketenagalistrikan Nasional (Skala 100)		69,43	69,88	70,33	70,78	71,23					
	2 Indeks Ketahanan Ketenagalistrikan Nasional (Skala 100)		85,95	86,99	88,38	89,22	90,19					
	3 Indeks Ketersediaan Infrastruktur Ketenagalistrikan untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar (Indeks Skala 100)		100	100	100	100	100					
	4 Indeks Keselamatan Ketenagalistrikan (Skala 4)		2,1	2,2	2,3	2,4	2,5					
Kegiatan 1	Pembinaan, Pengaturan dan Pengawasan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan Pengembangan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik											
Sasaran Kegiatan 1	Terapainya Ketahanan Ketenagalistrikan Nasional dalam Peningkatan Kualitas Listrik dan Keterjangkauan Tarif	Pusat										
Indikator Kegiatan 1	1 SAIDI Nasional (Jam/Pelanggan/Tahun)		15	10	5	3	1					
	2 SAFTI Nasional (Kali/Pelanggan/Tahun)		10	8	5	3	1					

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	3		25	26	28	29	30						
	4		9,2	9,01	8,93	8,78	8,6						
	5		100	100	100	100	100						
	6		78,88	78,91	79,44	79,47	80,02						
	7		168	390	693	1.030	1.558						
Sasaran Kegiatan 2	Tercapainya Ketersediaan Infrastruktur Ketegalistrikan untuk Mendukung Perumbuhan Ekonomi dan Pelayanan Duser	Pusat											
Indikator Kegiatan 2	1		339.082,70	339.946,10	382.696,10	406.325	431.281,20						
	2		77.107	79.187	81.217	83.219	85.216						
	3		3	3	3	3	3						

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target				Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana	
			2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023		2024
	4 Alokasi Listrik untuk Rumah Tangga Miskin dan Rentan yang Memperoleh Subsidi Listrik (GWh)		60.079,83	64.257,80	68.894,40	73.608,75	78.190,61					
Sasaran Kegiatan 3	Tercapainya Upaya Peningkatan Tata Kelola Subsektor Ketenagalistrikan dalam Bidang Pengusahaan	Pusat										
Indikator Kegiatan 3	1 Jumlah Rekomendasi Peningkatan Mutu Pelayanan dan Efisiensi Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Rekomendasi)		1	1	1	1	1					
	2 Jumlah Rekomendasi Subsidi Listrik Tepat Sasaran (Regulasi/ Kebijakan)		1	1	1	1	1					
	3 Jumlah Kebijakan Harga Jual Tenaga Listrik dan Tarif Tenaga Listrik (Rekomendasi)		2	2	2	2	2					
Kegiatan 2	Penyusunan Kebijakan dan Program serta Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Ketenagalistrikan											
Sasaran Kegiatan 1	Tercapainya Kemandirian Ketenagalistrikan Nasional Terhadap Suplai Energi Listrik	Pusat										
Indikator Kegiatan 1	1 Rasio Impor Listrik Terhadap Kebutuhan Listrik dalam Negeri (%)		0,54	0,54	0,54	0,54	0,54					

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana		
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024			
Sasaran Kegiatan 2	Tercapainya Ketahanan Ketenagalistrikan Nasional dalam Peningkatan Akses Listrik dan Kecukupan Suplai Energi Listrik	Pusat													
Indikator Kegiatan 2	1 Konsumsi Listrik per Kapita Nasional (kWh/kapita)		1.142	1.203	1.268	1.336	1.408								
	a Jumlah Rekomendasi Penguatan Pemenuhan Akses dan Konsumsi Listrik pada Masyarakat (Rekomendasi)		1	1	1	1	1								
	b Rasio Elektrifikasi Nasional (%)		100	100	100	100	100								
	c Penambahan Pembangkit Tenaga Listrik (Tanpa Potensi Creating Market EBT) (MW)		5.209,48	6.187,91	2.949,58	5.511,69	5.174,85								
	c. 1 Jumlah Penambahan PLT Berbasis Fosil (MW)		4.765,58	5.444,5	1.521	4.431	2.065								
	a. Jumlah Penambahan PLTU (MW)		1.194,5	855,5	576	471	65								
	b. Jumlah Penambahan PLTU USC (MW)		1.950	2.950	-	1.000	2.000								
	c. Jumlah Penambahan PLTU MT (MW)		-	-	600	1.200	-								
	d. Jumlah Penambahan PLTG/GU/MG (MW)		1.621,08	1.639	345	1.760	-								

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target				Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana	
			2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023		2024
c. 2	Jumlah Peningkatan PLT Berbasis EBT yang Tercantum pada RUJPTL PT PLN (Persero) Tahun 2019-2028 (MW)		443,90	743,41	1.428,58	1.080,69	3.109,85					
			140	80	132	300	375					
			165,20	440,29	918,56	245,69	1.936,55					
			138,70	60,20	356,90	49,80	1.02,60					
			-	162,92	11,12	315,20	315,70					
c. 3	Jumlah Rekomendasi Peningkatan Pembangkit Listrik (Rekomendasi)		-	-	10	170	380					
			1	1	1	1	1					

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana		
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024			
Sasaran Kegiatan 3	Tercapainya Penambahan Infrastruktur ketenagalistrikan untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Pusat													
Indikator Kegiatan 3	1. Penambahan Transmisi Tenaga Listrik (kms)		4.459,60	4.765,90	4.632,10	3.519,50	1.692								
	2. Penambahan Gardu Induk Tenaga Listrik (MVA)		14.247	8.460	7.510	3.900	4.490								
	2. Jumlah Rekomendasi Pengendalian Pembangunan Jaringan Transmisi dan Gardu Induk (Rekomendasi)		1	1	1	1	1								
	3. Penambahan Jaringan Distribusi Tenaga Listrik (kms)		46.412	42.714	50.657	43.065	43.113								
	4. Penambahan Gardu Distribusi Tenaga Listrik (MVA)		3.212	3.022	3.615	3.206	3.119								
	4. Jumlah Rekomendasi Pengendalian Pembangunan Jaringan Distribusi dan Gardu Distribusi (Rekomendasi)		1	1	1	1	1								
	5. Pengembangan Smart Grid (Lokasi)		5	5	5	5	5								

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
Kegiatan 3	Pembinaan Keselamatan dan Lindungan Lingkungan Ketenagalistrikan serta Usaha Jasa Pemunjang Tenaga Listrik													
Sasaran Kegiatan 1	Tercapainya Kemandirian Ketenagalistrikan Nasional Terhadap Teknologi	Pusat												
Indikator Kegiatan 1	1. Persentase Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Subsektor Ketenagalistrikan untuk Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik (%)		33	34	35	36	37							
Sasaran Kegiatan 2	Tercapainya Ketersediaan Infrastruktur Ketenagalistrikan yang Ramah Lingkungan untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Pusat												
Indikator Kegiatan 2	1. Penurunan Emisi CO2 Pembangkit (juta ton)		4,71	4,92	5,36	5,91	6,07							
	1. Jumlah Layanan Dukungan Sektor Ketenagalistrikan dalam Pencapaian Target Mitigasi Gas Rumah Kaca Sektor Energi (Rekomendasi)		1	1	1	1	1							
Sasaran Kegiatan 3	Tercapainya Pemanahan Kaidah Keselamatan dan Keamanan Ketenagalistrikan	Pusat												

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
Indikator Kegiatan 3	1 Indeks Keselamatan Ketenagalistrikan (Indeks Skala 4)		2,1	2,2	2,3	2,4	2,5							
Sasaran Program 2	Optimalisasi Kontribusi Subsektor Ketenagalistrikan yang Bertanggungjawab dan Berkelanjutan	Pusat												
Indikator Program	1 Persentase Realisasi Investasi Subsektor Ketenagalistrikan (%)		90	100	100	100	100							
Kegiatan 1	Penyusunan Kebijakan dan Program serta Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Ketenagalistrikan													
Sasaran Kegiatan 1	Optimalisasi Kontribusi Subsektor Ketenagalistrikan yang Bertanggungjawab dan Berkelanjutan	Pusat												
Indikator Kegiatan 1	1 Investasi Subsektor Ketenagalistrikan (MUSD)		11,95	9,91	7,55	6,64	3,10							
Kegiatan 2	Pembinaan, Pengaturan dan Penawasan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan Pengembangan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik													
Sasaran Kegiatan 1	Layanan Pengaduan Konsumen Listrik	Pusat												
Indikator Kegiatan 1	1 Jumlah Penanganan Pengaduan Konsumen Listrik (Pengaduan)		100	100	100	100	100							

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target				Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022		2023	2024		
Kegiatan 3	Pembinaan Keselamatan dan Lindungan Lingkungan Ketenagalistrikan serta Usaha Jasa Pemunjang Tenaga Listrik														
Sasaran Kegiatan 1	Terapainya Efektivitas dan Efisiensi dalam Pelayanan Sambungan Listrik Baru	Pusat													
Indikator Kegiatan 1	1 Jumlah Rekomendasi Upaya Peningkatan Peningkat Getting Electricity pada Ease of Doing Business (EoDB) (Rekomendasi)		1	1	1	1	1								
Sasaran Program 3	Pembinaan, Pengawasan, dan Peneguhan Subsektor Ketenagalistrikan yang Efektif	Pusat													
Indikator Program 3	1 Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Subsektor Ketenagalistrikan (Skala 100)		78,16	80,70	83,23	85,77	88,31								
Kegiatan 1	Pembinaan, Pengaturan dan Pengawasan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan Pensembangan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik														
Sasaran Kegiatan 1	Pembinaan, Pengawasan, dan Peneguhan Subsektor Ketenagalistrikan yang Efektif	Pusat													

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target				Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana	
			2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023		
Indikator Kegiatan 1	- Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Subsektor Ketenagalistrikan (Skala 100)		78,16	80,70	83,23	85,77	88,31					

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
DIREKTORAT JENDERAL EBTKE														
Sasaran Program 1	Meningkatnya Kemandirian dan Ketahanan Energi Subsektor EBTKE yang Berkelanjutan													
Indikator Sasaran Program	1 TKDN Subsektor EBTKE dalam rangka mendukung kemandirian energi nasional (Skala 100)		55,45	55,45	55,45	55,45	55,45	55,45	0	0	0	0	0	DEB, DEK, DEA, DEP, DEI (Utama), SDE (Pendukung)
	2 Indeks Ketahanan Energi Subsektor EBTKE (Skala 100)		49,50	49,95	50,52	51,38	52,30	0	0	0	0	0	0	DEB, DEK, DEA, DEP, DEI (Utama), SDE (Pendukung)
Kegiatan 1	Pembinaan, Pengawasan dan Pengusahaan Bioenergi													
Sasaran Kegiatan	Meningkatnya Kemandirian dan Ketahanan Energi Subsektor EBTKE yang Berkelanjutan													
Indikator Sasaran Kegiatan	1 Kapasitas terpasang tambahan PLT Bioenergi (MW)		246,7	152	484,8	159	252,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2 TKDN pembangkit PLT Bioenergi (%)		40	40	40	40	40	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3 Pemanfaatan Biofuel untuk domestik (juta KL)		10	10,2	14,2	14,6	17,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4 Pemanfaatan Biogas (ribu m3/tahun)		28.910,0	30.530,0	32.150,0	33.770,0	35.390,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target				Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana					
			2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023		2024				
Kegiatan 2	Pembinaan, Pengawasan dan Pengusahaan Aneka Energi Baru Terbarukan															
Sasaran Kegiatan 1	Memperkuatnya Kemandirian dan Ketahanan Energi Subsektor EBTKE yang berkelanjutan															
Indikator Sasaran Kegiatan	1	Peningkatan kapasitas terpasang PLTA/M/MH (MW)	165,2	440,3	955,9	397	1.951,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a. PLTA (MW)	129	274	755	93,32	1.157	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b. PLTM (MW)	36,20	166,29	200,88	303,69	794,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indikator Sasaran Kegiatan	2	Peningkatan kapasitas terpasang PLTS (MW)	134,6	328,8	339,1	643,2	643,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a. PLTS Rooftop (MW)	34,63	35,88	38,53	47,37	51,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b. PLTS (MW)	99,97	292,94	300,59	595,83	591,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indikator Sasaran Kegiatan	3	Peningkatan kapasitas terpasang PLTB (MW)	0	0	10	279	440	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		TKDN PLTB (%)	40	40	40	40	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indikator Sasaran Kegiatan	5	TKDN PLTS (%)	40	40	40	40	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		TKDN PLTA (%)	70	70	70	70	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target				Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
			2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2024		
7	PLTN Komersial yang Dibangun		Meneliti pengembangan teknologi PLTN disertai aspek-aspek keekonomian dan keselamatan	Mendorong penguasaan teknologi PLTN sejalan dengan perkembangan teknologi PLTN di dunia	Membangun kerja sama internasional terkait studi pengembangan PLTN	Melakukan analisis multi kriteria terhadap implementasi PLTN mencakup kepentingan mendesak, skala besar, jaminan pasokan, kesinambungan pasokan dan keselamatan energi, pengurangan emisi karbon, faktor keselamatan dan skala keekonomian	0	0	0	0	0	0	0
Kegiatan 3	Pembinaan, Penerapan dan Pengawasan Konservasi Energi												
Sasaran Kegiatan 1	Meningkatnya Kemudahan dan Ketahanan Energi Subsektor EBTKE yang Berkelanjutan												
Indikator Sasaran Kegiatan 1	1 Penurunan Intensitas Energi Final (SBM/ Miliar Rp)		0,9	0,9	0,9	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0
Indikator Sasaran Kegiatan 2	2 Intensitas Energi Primer (SBM/ Miliar Rp)		139,50	138	136,60	135,20	135,20	135,20	135,20	135,20	135,20	135,20	0
Indikator Sasaran Kegiatan 3	3 Jumlah peralatan yang disusun SKEM-nya (peralatan)		3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	4 Reduksi Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Sektor ESDM (Juta Ton)		58	67	91	116	142	0	0	0	0	0	0
	5 Intensitas reduksi emisi GRK sektor energi (ton/orang)		0,21	0,25	0,33	0,42	0,50	0	0	0	0	0	0
Kegiatan 4	Pembiayaan, Pengawasan dan Pengusahaan Panas Bumi												
Sasaran Kegiatan	Meningkatnya Kemandirian dan Ketahanan Energi Subsektor EBTKE yang berkelanjutan												
Indikator Sasaran Kegiatan	1 Peningkatan kapasitas terpasang PLTP (MW)		140	80	132	300	375	0	0	0	0	0	0
	2 TKDN PLTP (%)		30	30	33	33	35	0	0	0	0	0	0
	3 Jumlah Wilayah Panas Bumi yang ditetapkan		2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0
	4 Jumlah Wilayah Panas Bumi yang ditawarkan		5	5	5	4	3	0	0	0	0	0	0
Kegiatan 5	Perencanaan, Pembangunan dan Pengawasan Infrastruktur Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi												
Sasaran Kegiatan	Meningkatnya Kemandirian dan Ketahanan Energi Sektor EBTKE yang berkelanjutan												
Indikator Sasaran Kegiatan	1 Persentase TKDN Infrastruktur Terbangun (%)		40	40	40	40	40	0	0	0	0	0	0
	2 Peningkatan kapasitas PLTS Rooftop dan PLT EBT Lainnya (MW)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	a. PLTS Rooftop		10	10	10	10	10	0	0	0	0	0	0	
	b. PLTS		0	15	15	15	15	0	0	0	0	0	0	
	c. PLTM		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	d. PLTBg FOME		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Penambahan kapasitas PLTS Terpusat (Unit)		0	0	5 (1 MW)	5 (1 MW)	5 (1 MW)	0	0	0	0	0	0	
4	Persentase penyelesaian Realisasi Pembangkit EBT (%)		19,4	63,9	16,7	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Persentase penyelesaian pembangunan peralatan Efisiensi Energi (%)		100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sasaran Program 2	Optimalisasi kontribusi Subsektor EBTKE yang bertanggung jawab dan berkelanjutan													
Indikator Sasaran Program	1		93	93	93	94	94	94	94	94	94	94	94	DEP (Utama) SDE (Pendukung)
	2		90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	DEB, DEK, DEA, DEP, DEI (Utama), SDE (Pendukung)
Kegiatan 1	Pembinaan, Pengawasan dan Penguasaan Biroenergi													
Sasaran Kegiatan	Optimalisasi kontribusi Dit. Biroenergi yang bertanggung jawab dan berkelanjutan	Pusat												

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
Indikator Sasaran Kegiatan	Realisasi Investasi Bioenergi (Miliar USD)		0,42	0,20	1,76	0,19	0,33	-	-	-	-	-	-
Kegiatan 2	Pembinaan, Pengawasan dan Penyelesaian Aneka Energi Baru Terbarukan												
Sasaran Kegiatan	Optimalisasi kontribusi Dit. Aneka EBT yang bertanggung jawab dan berkelanjutan	Pusat											
Indikator Sasaran Kegiatan	Realisasi Investasi Aneka EBT (Miliar USD)		0,54	1,39	2,51	2,11	5,63	-	-	-	-	-	-
Kegiatan 3	Pembinaan, Penerapan dan Pengawasan Konservasi Energi												
Sasaran Kegiatan	Optimalisasi kontribusi Dit. Konservasi Energi yang bertanggung jawab dan berkelanjutan	Pusat											
Indikator Sasaran Kegiatan	Realisasi Investasi Konservasi Energi (Miliar USD)		0,008	0,010	0,011	0,013	0,014	-	-	-	-	-	-
Kegiatan 4	Pembinaan, Pengawasan dan Penyelesaian Panas Bumi												
Sasaran Kegiatan 1	Optimalisasi kontribusi Dit. Panas Bumi yang bertanggung jawab dan berkelanjutan	Pusat											
Indikator Sasaran Kegiatan	1 Realisasi PNEBP Panas Bumi (Miliar Rp)		1,196	1,369	1,599	1,970	2,181	-	-	-	-	-	-
	2 Realisasi Investasi Panas Bumi (Miliar USD)		1,050	1,330	1,290	1,310	1,560	-	-	-	-	-	-

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target				Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana					
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022		2023	2024			
Sasaran Program 3	Layanan Subsektor EBTKE yang Optimal															
Indikator Sasaran Program	Indeks Kepuasan Layanan Dihen EBTKE (Indeks Skala 4)		3,10	3,15	3,20	3,25	3,30	0	0	0	0	0	0	0	0	DEB, DEK, DEA, DEP, DEI (Utama), SDE (Pendukung)
Kegiatan 1	Pembinaan, Pengawasan dan Pengusahaan Bioenergi															
Sasaran Kegiatan	Layanan Dit. Bioenergi yang Optimal	Pusat														
Indikator Sasaran Kegiatan	Indeks Kepuasan Layanan Direktorat Bioenergi (Skala 4)		3,10	3,15	3,20	3,25	3,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kegiatan 2	Pembinaan, Pengawasan dan Pengusahaan Aneka Energi Baru Terbarukan															
Sasaran Kegiatan	Layanan Sektor EBTKE yang Optimal	Pusat														
Indikator Sasaran Kegiatan	Indeks Kepuasan Layanan Direktorat Aneka EBT (Skala 4)		3,10	3,15	3,20	3,25	3,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kegiatan 3	Pembinaan, Penerapan dan Pengawasan Konservasi Energi															
Sasaran Kegiatan	Layanan Dit. Konservasi Energi yang Optimal	Pusat														
Indikator Sasaran Kegiatan	Indeks Kepuasan Layanan Direktorat Konservasi (Skala 4)		3,1	3,15	3,2	3,25	3,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target				Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana				
			2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023		2024			
Kegiatan 4	Pembinaan, Pengawasan dan Pengusahaan Panas Bumi														
Sasaran Kegiatan 1	Layanan Dit. Panas Bumi yang Optimal	Pusat													
Indikator Sasaran Kegiatan 4)	Indeks Kepuasan Layanan Direktorat Panas Bumi (Skala 4)		3,1	3,15	3,2	3,25	3,3	-	-	-	-	-	-	-	-
Kegiatan 5	Perencanaan, Pembangunan dan Pengawasan Infrastruktur Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi														
Sasaran Kegiatan 1	Layanan Dit. Infrastruktur EBT yang Optimal	Pusat													
Indikator Sasaran Kegiatan	Indeks Kepuasan Layanan Direktorat Infrastruktur EBT (Skala 4)		3,1	3,15	3,2	3,25	3,3	-	-	-	-	-	-	-	-
Sasaran Program 4	Pembinaan dan Pengawasan Subsektor EBTKE yang Efektif														
Indikator Sasaran Program	Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan (Skala 100)		75,50	76,50	77,50	78,50	79,50								DEB, DEK, DEA, DEP, DEI (Utama), SDE (Perdukuns)
Kegiatan 1	Pembinaan, Pengawasan dan Pengusahaan Bioenergi														
Sasaran Kegiatan	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Dit. Bioenergi yang Efektif	Pusat													

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
Indikator Sasaran Kegiatan	Indeks Kepuasan Layanan Direktorat Bioenergi (Skala 4)		75,5	76,5	77,5	78,5	79,5	-	-	-	-	-	-
Kegiatan 2	Pembinaan, Pengawasan dan Penguasaan Aneka Energi Baru Terbarukan												
Sasaran Kegiatan	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Dit. Aneka EBT yang Efektif	Pusat											
Indikator Sasaran Kegiatan	Indeks Efektifitas Pembinaan dan Pengawasan (Nilai)		75,5	76,5	77,5	78,5	79,5	-	-	-	-	-	-
Kegiatan 3	Pembinaan, Penerapan dan Pengawasan Konservasi Energi												
Sasaran Kegiatan	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Dit. Konservasi Energi yang Efektif	Pusat											
Indikator Sasaran Kegiatan	Indeks Efektifitas Pembinaan dan Pengawasan (Skala 100)		75,5	76,5	77,5	78,5	79,5	-	-	-	-	-	-
Kegiatan 4	Pembinaan, Pengawasan dan Penguasaan Panas Bumi												
Sasaran Kegiatan 1	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Dit. Panas Bumi yang Efektif	Pusat											
Indikator Sasaran Kegiatan	Indeks Efektifitas Pembinaan dan Pengawasan (Skala 100)		75,5	76,5	77,5	78,5	79,5	-	-	-	-	-	-
PROGRAM PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA													

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA														
Sasaran Program 1	Meningkatnya Kemandirian dan Ketahanan Batubara Nasional													
Indikator Sasaran Program	1 Indeks Kemandirian Energi Nasional Subsektor Batubara (Skala 100)		87,93	88,21	89,07	89,32	89,58	7,49	7,90	7,41	7,87	7,95	DBP, DBB	
	2 Indeks Ketahanan Energi Nasional Subsektor Batubara (Skala 100)		90	90	90	90	90	13,40	14,06	13,42	13,76	14,13	DBP, DBB	
Kegiatan 1	Pembinaan dan Pengusahaan Batubara													
Sasaran Kegiatan	Meningkatnya Kemandirian dan Ketahanan Batubara Nasional													
Indikator sasaran Kegiatan	1 Indeks Kemandirian Energi Nasional Subsektor Batubara (Skala 100)		87,9	88,2	89,1	89,3	89,6	3,9	4,4	3,9	4,3	4,4		
	a. Persentase P3DN dan peningkatan TKDN Batubara (%)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	a.1. Pembelian Barang Domestik (%)		78,5	79,0	79,5	80	80,5	0	0	0	0	0	DBB - SDBU	
	a.2. Persentase Penanaman TKDN untuk Subsektor Batubara (%)		10	12	14	16	18	0	0	0	0	0	DBB - SDBU	
	b. Persentase Kepemilikan Modal Dalam Negeri Untuk Subsektor Batubara (%)		83,9	84,3	88,6	88,8	89,1	0	0	0	0	0	DBB - SDBU	

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
2	Indeks Ketahanan Energi Nasional Subsektor Batubara (Skala 100)		90	90	90	90	90	12,3	13,0	12,3	12,7	13,0	DBB - SDOP
	a. Rasio Produksi Batubara (%)		100	100	100	100	100	0	0	0	0	0	DBB - SDOP
	a.1. Pengawasan Jumlah Produksi Batubara (Juta Ton)		550	609	618	625	628	0	0	0	0	0	DBB - SDOP
	a.2. Pengawasan Alokasi Batubara untuk kepentingan dalam negeri (untuk PLTU dan seluruh industri pengguna batubara) - (DMO) (Juta Ton)		155	168	177	184	187	0	0	0	0	0	DBB - SDOP
	b. Cadangan di bagi Produksi Batubara (Tahun)		71,5	63,7	61,9	60,3	59,2	0	0	0	0	0	DBB - SDOP
	b.1. Cadangan (Juta Ton)		39306	38776	38246	37702	37152	0	0	0	0	0	DBB - SDPE
	c. Rasio Realisasi Pemenuhan Kebutuhan Kewajiban Batubara Dalam Negeri (%)		100	100	100	100	100	0	0	0	0	0	DBB - SDOP
	c.1. Pengawasan Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Batubara Dalam Negeri (Juta Ton)		155	168	177	184	187	0	0	0	0	0	DBB - SDOP
	d. Harga Batubara Acuan (Jumlah Persetujuan)		12	12	12	12	12	0	0	0	0	0	DBB - SDOP

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target				Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana		
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023		2024	
Kegiatan 2	Penyusunan Kebijakan dan Program serta Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Mineral dan Batubara													
Sasaran Kegiatan	Memperkuatnya Kemandirian Dan Kerahibanan Batubara Nasional													
Indikator Sasaran Kegiatan	1 Indeks Kemandirian Energi Nasional Subsektor Batubara (Skala 100)		87,9	88,2	89,1	89,3	89,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	DBP - SDP3
	a. Rasio Suplai Batubara Impor yang Digunakan untuk Pembangkit Listrik atau Sebagai Sumber Energi Primer (%)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DBP - SDP3
Indikator Sasaran Kegiatan	a.1. Impor Batubara (Juta Ton)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DBP - SDP3
	a.2. Kebutuhan Batubara Domestik (Hanya Untuk PLTU) yang Dirombak (Juta Ton)		109	121	129	135	137	0	0	0	0	0	0	DBP - SDP3
Indikator Sasaran Kegiatan	2 Indeks Ketahanan Energi Nasional Subsektor Batubara (Skala 100)		90	90	90	90	90	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	DBP - SDP3
	a. Rasio Produksi Batubara (%)		100	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	DBP - SDP3

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target				Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana	
			2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023		2024
	a.1. Jumlah Produksi Batubara yang Direncanakan (Juta Ton)		550	609	618	625	628	0	0	0	0	DBP - SDP3
	a.2. Alokasi Batubara untuk kepentingan dalam negeri (untuk PLTU dan seluruh industri pengguna batubara) - (DMO) yang Direncanakan (Juta Ton)		155	168	177	184	187	0	0	0	0	DBP - SDP3
	b. Cadangan dibagi Produksi Batubara (Tahun)		71,5	63,7	61,9	60,3	59,2	0	0	0	0	DBP - SDP3
	b.1. Cadangan (Juta Ton)		39.306	38.776	38.246	37.70	37.152	0	0	0	0	DBP - SDP3
	c. Rasio Realisasi Pemenuhan Kebutuhan Kewajiban Batubara Dalam Negeri (%)		100	100	100	100	100	0	0	0	0	DBP - SDP3
	c.1. Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Batubara Dalam Negeri yang Direncanakan - (DMO) (Juta Ton)		155	168	177	184	187	0	0	0	0	DBP - SDP3
	d. Rasio Pemanfaatan Batubara untuk Peningkatan Nilai Tambah Batubara (%)		50	50	50	50	50	0	0	0	0	DBP - SDP3

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	d.1. Batubara produksi dalam negeri yang dimanfaatkan untuk meningkatkan nilai tambah batubara yang direncanakan (ribu ton)		500	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	DBP - SDP3
	d.2. Target kapasitas maksimal dari batubara produksi dalam negeri yang dimanfaatkan untuk meningkatkan nilai tambah batubara yang direncanakan (ribu ton)		1000	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	DBP - SDP3
Sasaran Program 2	Optimalisasi Ketersediaan Pasokan mineral													
Indikator Sasaran Program 1	1. Indeks Pasokan Mineral untuk Peningkatan Nilai Tambah Dalam Negeri		75,04	75,53	77,63	78,86	79,42	16,37	17,89	19,56	21,41	23,44	DBP, DBM	
Kegiatan 1	Penyusunan Kebijakan dan Program serta Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Mineral dan Batubara													
Sasaran Kegiatan	Optimalisasi Ketersediaan Pasokan mineral	Pusat												
Indikator Sasaran Kegiatan	Indeks Pasokan Mineral untuk Peningkatan Nilai Tambah Dalam Negeri		75,04	75,53	77,63	78,86	79,42	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	DBP - SDP3	
	a. Rasio Produksi Mineral yang Diproses di Dalam Negeri (Rasio)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DBP - SDP3	
	a.1. Emas dan Perak		0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	-	-	-	-	-	DBP - SDP3	

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	- Emas dan Pemak Diproses (Ton)		17.756.143	20.459.812	16.382.359	14.752.904	14.367.576	-	-	-	-	-	-	-
	- Produksi Bahan Mentah (Ton)		21.693.601	25.402.812	19.347.083	17.685.234	17.202.304	-	-	-	-	-	-	-
a. 2.	Tembaga (Bijih)		0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	-	-	-	-	-	-	DBP - SDP3
	- Tembaga dari Bijih Diproses (Ton)		1.673.157	1.673.157	4.200.000	5.400.000	8.300.000	-	-	-	-	-	-	-
	- Produksi Bahan Mentah (Ton)		2.091.446	2.100.000	5.007.446	6.517.446	9.812.446	-	-	-	-	-	-	-
a. 3.	Tembaga (Konsentrat)		0,44	0,37	0,28	0,28	0,38	-	-	-	-	-	-	DBP - SDP3
	- Tembaga dari Konsentrat Diproses (Ton)		1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	-	-	-	-	-	-	-
	- Produksi Bahan Mentah (Ton)		2.263.039	2.718.571	3.584.208	3.630.893	3.515.03	-	-	-	-	-	-	-
a. 4.	Timah		0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	-	-	-	-	-	-	DBP - SDP3
	- Timah Diproses (Ton)		98.793	98.793	98.793	98.793	98.793	-	-	-	-	-	-	-
	- Produksi Bahan Mentah (Ton)		123.491	123.491	123.491	123.491	123.491	-	-	-	-	-	-	-
a. 5.	Nikel		0,66	0,71	0,73	0,73	0,73	-	-	-	-	-	-	DBP - SDP3
	- Nikel Diproses (Ton)		12.766.803	21.322.581	43.582.951	52.606.920	52.139.014	-	-	-	-	-	-	-
	- Produksi Bahan Mentah (Ton)		19.310.791	30.100.934	59.943.600	71.744.007	71.399.310	-	-	-	-	-	-	-
a. 6.	Bauksit		0,16	0,26	0,8	0,8	0,8	-	-	-	-	-	-	DBP - SDP3

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Indikasi/Alokasi (dalam miliar rupiah)					Unit Organisasi Pelaksanaan
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	- Bankait Diproses (Ton)		4.363.000	7.242.880	17.492.880	23.309.796	23.309.796	-	-	-	-	-	-
	- Produksi Bahan Mentah (Ton)		26.757.600	27.833.000	21.866.100	29.137.245	29.137.245	-	-	-	-	-	-
Kegiatan 2	Pembinaan dan Pengusahaan Mineral												
Sasaran Kegiatan	Optimalisasi Ketersediaan Pasokan mineral	Pusat											
Indikator Sasaran Kegiatan	Indeks Pasokan Mineral untuk Peningkatan Nilai Tambah Dalam Negeri		75,04	75,53	77,63	78,86	79,42	15,21	16,73	18,40	20,25	22,28	-
	a. Utilisasi Fasilitas Pencolahan/Pemurnian (%)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DBM - SDOP
	a. 1. Emas (%)		35	35	35	40	40	-	-	-	-	-	DBM - SDOP
	a. 2. Perak (%)		60	60	60	62	62	-	-	-	-	-	DBM - SDOP
	a. 3. Timah (%)		60	60	60	65	65	-	-	-	-	-	DBM - SDOP
	a. 4. Tembaga (%)		65	65	65	70	70	-	-	-	-	-	DBM - SDOP
	a. 5. Nikel Olahhan (FeNi +NPI) (%)		70	70	70	75	75	-	-	-	-	-	DBM - SDOP
	a. 6. Nikel Matte (%)		90	90	90	95	95	-	-	-	-	-	DBM - SDOP
	a. 7. Bankait (%)		65	65	65	68	68	-	-	-	-	-	DBM - SDOP
	b. Persentase P3DN dan peningkatan TKDN (%)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DBM - SDBU